



Memahami pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan pekerja muda di Indonesia

RINGKASAN LAPORAN

Program Memahami Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak (UCW)
Villa Aldobrandini
V. Panisperna 28
00184 Roma

Tel: +39 06.4341.2008
Faks: +39 06.6792.197
Email: info@ucw-project.org

Roma
April 2012

Daftar Isi

Pendahuluan	7
BAGIAN 1. Memahami pekerjaan yang dilakukan oleh anak	8
BAGIAN 2. Memahami pekerja muda	16
BAGIAN 3. Merespons masalah pekerja anak dan pekerja muda	25
Merespons masalah pekerja anak	26
Merespons masalah pekerja muda	32

Daftar tabel

Tabel 1.	Status kegiatan anak, 7-14 tahun kelompok usia, menurut jenis kelamin	8
Tabel 2.	Perkiraan keterlibatan pekerja anak, berdasarkan UU nasional dan metode statistik internasional dan standar penilaian tentang perburuhan anak)	13
Tabel 3.	Indikator rata-rata pasar tenaga kerja, mereka yang berusia 15-24 tahun, menurut tempat tinggal dan jenis kelamin	17
Tabel 4.	Formalitas pekerjaan,(a) presentase pekerja usia 15-24 tahun, menurut tempat tinggal dan region	20
Tabel 5.	Pekerjaan di sektor non-pertanian (a), presentase warga desa usia 15-24 tahun yang bekerja, menurut jenis kelamin	21
Tabel 6.	Meningkatkan akses dan mutu sekolah: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	28
Tabel 7.	Menilai kebutuhan akan peluang belajar kedua bagi anak-anak putus sekolah	28
Tabel 8.	Peluang belajar kedua: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	29
Tabel 9.	Memperluas perlindungan sosial: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	29
Tabel 10.	Komunikasi yang strategis, mobilisasi sosial dan advokasi: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	31
Tabel 11.	Pengembangan keterampilan: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	33
Tabel 12.	Dukungan pencarian kerja: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	34
Tabel 13.	Mempromosikan kewirausahaan remaja dan wirausaha: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	35
Tabel 14.	Memastikan kesempatan yang adil bagi perempuan muda di pasar tenaga kerja: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan	36

Daftar gambar

Gambar 1.	Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan menurut usia	9
Gambar 2.	Sektor dan status anak-anak yang bekerja, kelompok usia 7-14 tahun	10
Gambar 3.	Tingkat kehadiran di sekolah, menurut status pekerjaan dan usia	10
Gambar 4.	Jam kerja dan kehadiran di sekolah (perkiraan non-parametris)	11
Gambar 5.	Anak-anak putus sekolah, menurut usia	11
Gambar 6.	Kerangka kerja untuk identifikasi secara statistik perburuhan anak di Indonesia	12
Gambar 7.	Jumlah anak-anak yang terpapar pekerjaan tertentu yang berbahaya, menurut kelompok usia dan jenis bahaya	14
Gambar 8.	Dekomposisi penduduk muda menurut status kegiatan	16
Gambar 9.	Penduduk tidak aktif dan tidak bersekolah (presentase penduduk usia 15-24 tahun), menurut status dan jenis kelamin	18
Gambar 10.	Dekomposisi penduduk muda yang tidak aktif dan tidak bersekolah menurut tingkat pendidikan), menurut jenis kelamin	18
Gambar 11.	Tingkat pengangguran (presentase penduduk aktif usia 15-24 tahun), menurut tempat tinggal, jenis kelamin dan kisaran usia	19
Gambar 12.	Tingkat setengah pengangguran menurut sektor(a) (presentase penduduk usia 15-24 tahun yang bekerja), menurut sektor	20
Gambar 13.	Upah rata-rata (dalam Rupiah)(a) kaum muda yang bekerja,(b) menurut tingkat pendidikan	22
Gambar 14.	Premi upah menurut jenis kelamin, kaum muda usia 15-24 tahun, yang terkait dengan jumlah mereka yang tidak bersekolah	22
Gambar 15.	Perbedaan dalam pengangguran (presentase penduduk aktif) antara pekerja muda dan pekerja dewasa	23

Gambar 16. Perbedaan dalam upah rata-rata(a)(dalam Rupiah), pekerja muda dan pekerja dewasa, menurut tempat tinggal dan status dalam pekerjaan	23
Gambar 17. Kecenderungan dalam indikator rata-rata pasar tenaga kerja, 2007-2010	24
Gambar 18. Respons terpadu terhadap masalah perburuhan anak dan ketenaga kerjaan muda	25

Pendahuluan

1. Mengatasi tantangan ganda yang terkait dengan perburuhan anak dan ketenaga kerjaan muda merupakan upaya penting bagi kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Angka perkiraan yang disajikan dalam laporan ini memperlihatkan bahwa sekitar 2,3 juta anak Indonesia usia 7-14 tahun masih terlibat dalam pekerjaan. Sedangkan hampir seperlima (19 persen) kaum muda Indonesia usia 15-24 tahun yang berada dalam angkatan kerja mengalami pengangguran, di mana jumlah ini beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan jumlah perkiraan pengangguran di kalangan pekerja dewasa. Dampak perburuhan anak dan pengangguran di kalangan muda terdokumentasikan dengan baik dalam laporan ini: di mana kedua masalah ini dapat mengakibatkan kerentanan sosial dan marginalisasi masyarakat, serta dapat secara permanen menghambat potensi produktif sehingga mempengaruhi pola kerja dan upah sepanjang hidup.
2. Masalah perburuhan anak dan ketenaga kerjaan muda terkait erat satu sama lain, dan ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan bersama untuk mengatasi masalah ini. Hasil kerja mantan pekerja anak dan mereka yang putus sekolah secara dini umumnya buruk. Mereka pun merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peluang terkecil untuk mengembangkan kemampuan kerja yang dibutuhkan agar dapat memperoleh pekerjaan yang menguntungkan. Kaum muda yang menganggur atau tidak bekerja secara produktif saat ini merupakan akibat dari perburuhan anak di masa lalu. Selain itu, hubungan antara perburuhan anak dengan hasil pasar tenaga kerja dapat berjalan ke arah berlawanan: prospek buruk pasar tenaga kerja di masa mendatang dapat mengurangi insentif keluarga untuk berinvestasi dalam permodalan manusia bagi anak-anak mereka.
3. Laporan ini membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan perburuhan anak dan ketenaga kerjaan muda dalam konteks Indonesia. Berdasarkan hasil-hasil terkait dengan sekolah, kegiatan kerja dan status di pasar tenaga kerja, laporan ini mempertimbangkan dimensi ekonomi dan sosial dari pekerja anak dan pekerja muda. Penelitian ini dilakukan berdasarkan berbagai laporan penelitian yang ada mengenai pekerja anak dan pekerja muda di Indonesia. Secara khusus, laporan ini disusun berdasarkan laporan tahun 2009 tentang pekerja anak di Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik dan ILO.¹ Survei Perburuhan Anak di Indonesia (2009) dan Survei Tenaga Kerja Nasional Indonesia (Sakernas) (Agustus 2010) menjadi sumber data utama bagi laporan ini.
4. Laporan ini dikembangkan bersama oleh pemerintah dan tiga lembaga mitra UCW. Laporan ini menyediakan dasar bagi tindakan penting bersama dalam mengatasi masalah pekerja anak dan pekerja muda. Ringkasan laporan ini disusun sebagai berikut. Bagian 1 laporan difokuskan pada upaya untuk memahami pekerjaan yang dilakukan anak; Bagian 2 mengenai memahami pekerja muda. Sedangkan Bagian 3 terkait dengan respons nasional terhadap masalah perburuhan anak dan ketenaga kerjaan muda.

1 Badan Pusat Statistik dan ILO, Working Children in Indonesia 2009.

Bagian 1. Memahami pekerjaan yang dilakukan oleh anak

5. **Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan masih menjadi masalah kebijakan yang penting di Indonesia.** Lebih dari 2,3 juta anak usia 7-14 tahun, atau hampir 7 persen dari kelompok usia ini, bekerja² pada tahun 2009. Hampir semua anak ini terlibat dalam perburuhan anak yang menurut peraturan perundangan Indonesia harus dihapus dan separuh dari mereka terpapar kondisi berbahaya di tempat kerja. Data berikut ini menunjukkan terjadinya penurunan secara keseluruhan dalam pekerja anak, yaitu dari 4,9 persen menjadi 3,7 persen dengan pengurangan pada populasi anak usia 10-14 tahun selama periode 2007 hingga 2010.³

Tabel 1. Status kegiatan anak, kelompok usia 7-14 tahun, menurut jenis kelamin

Status kegiatan	Jenis Kelamin		Tempat Tinggal		Total	
	Laki-laki %	Perempuan %	Kota %	Desa %	%	No.
Hanya bekerja	0,9	0,5	0,4	0,9	0,7	256,825
Hanya bersekolah	89,3	90,4	94,4	87,5	89,9	31,731,025
Bekerja dan bersekolah	6,1	5,7	2,8	7,5	5,9	2,086,037
Tidak ada kegiatan	3,6	3,4	2,4	4,1	3,5	1,239,537
Jumlah anak yang bekerja (a)	7,0	6,2	3,2	8,4	6,6	2,342,862
Jumlah anak yang bersekolah (b)	95,4	96,1	97,2	95,0	95,8	33,817,062
Jumlah anak putus sekolah(c)	4,5	3,9	2,8	5,0	4,2	1,496,362

Catatan: (a) Mengacu pada semua anak yang bekerja, tanpa memandang status pendidikan mereka; (b) mengacu pada semua anak yang bersekolah, tanpa memandang status pekerjaan mereka; dan (c) mengacu pada semua anak putus sekolah, tanpa memandang status pekerjaan mereka.

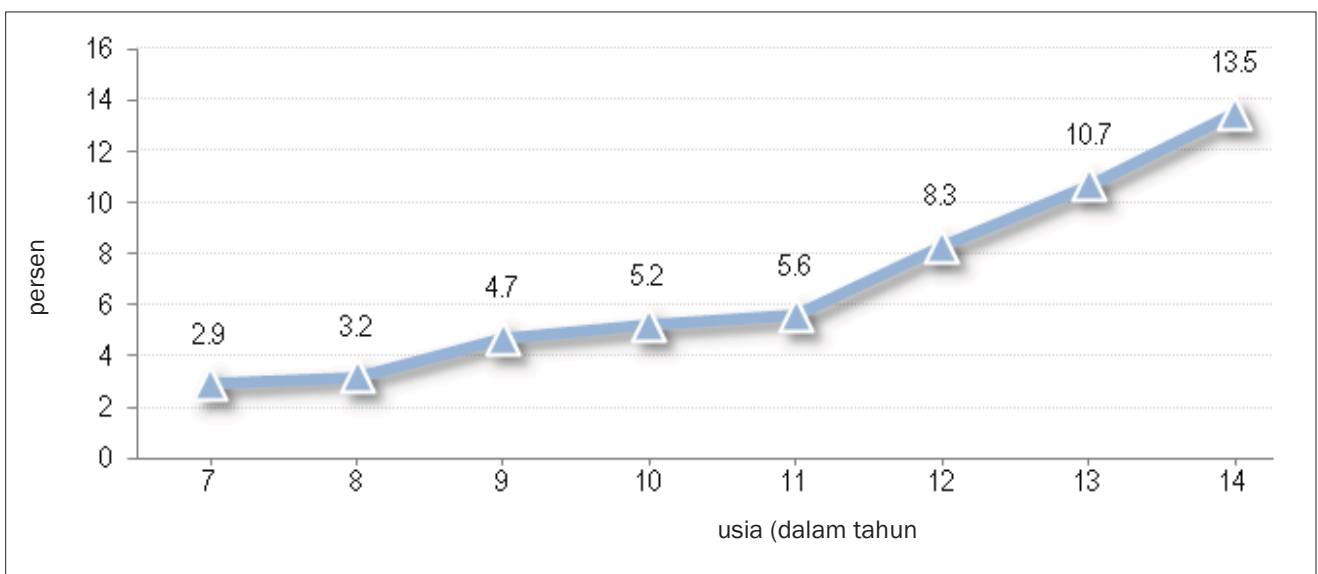
Sumber: kalkulasi UCW berdasarkan Survei Perburuhan Anak di Indonesia, 2009.

2 Anak-anak yang bekerja adalah konsep luas yang mencakup semua produksi pasar dan beberapa jenis produksi non-pasar (terutama produksi barang untuk pemakaian sendiri) (lihat Kotak 1). Konsep ini mencakup bentuk-bentuk pekerjaan di sektor formal dan informal, serta bentuk-bentuk pekerjaan baik di dalam maupun di luar keluarga.

3 Survei Tenaga Kerja Nasional Indonesia tidak mengumpulkan informasi tentang anak-anak di bawah usia 10 tahun. Mengingat metodologi survei yang digunakan berbeda, perhatian perlu diberikan dalam membandingkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional dengan Survei Pekerja Anak. Meski data yang dipergunakan berasal dari Survei Pekerja Anak di Indonesia, yang menjadi referensi utama dalam laporan ini, hanya mencapai tahun 2009, data dari Survei Tenaga Kerja Nasional Indonesia tersedia hingga periode empat tahun, 2007-2010, sehingga memungkinkan adanya sejumlah analisis mengenai kecenderungan pekerja anak untuk kelompok usia 10-14 tahun.

6. **Ada beberapa karakteristik penting dari pekerjaan yang dilakukan anak di Indonesia yang terkait dengan kebijakan.** Pertama, anak yang bekerja merupakan fenomena yang sering terjadi di desa kendati tidak secara eksklusif. Secara absolut, jumlah anak-anak desa yang bekerja tercatat hampir dua juta sementara di kota besar dan kecil hanya berkisar 386.000. Kedua, ada perbedaan besar secara regional dalam hal keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan. Hal ini memperlihatkan perlunya upaya untuk menghapus perburuhan anak. Sebagai contoh, hanya satu persen anak-anak (usia 10-14 tahun)⁴ yang bekerja di Jakarta, dibandingkan dengan delapan dan sembilan persen anak-anak yang bekerja di Pulau Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur. Ketiga, ada perbedaan dalam hal pekerja anak menurut jenis kelamin. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan gender memainkan peran penting dalam pemberian tanggung jawab pekerjaan kepada anak-anak di Indonesia. Pada akhirnya, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan meningkat tajam sejalan dengan peningkatan usia mereka, kendati jumlah anak-anak yang bekerja pada usia ini tidak boleh diabaikan. Hampir 600.000 anak di bawah 10 tahun telah bekerja pada tahun 2009.

Figur 1. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan menurut usia

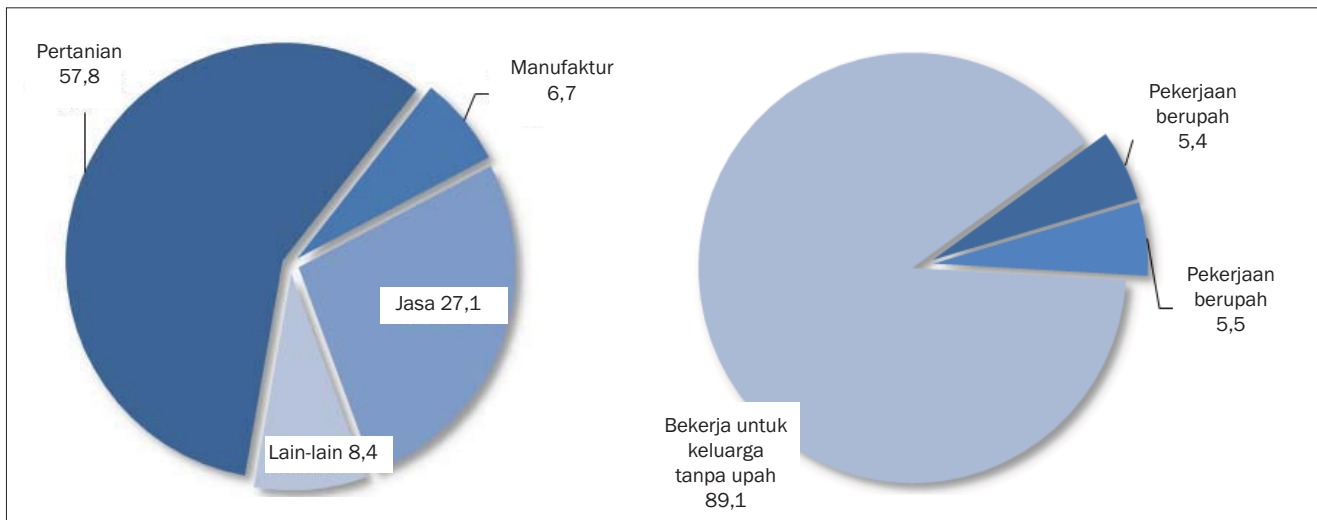


Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Pekerja Anak di Indonesia, 2009.

7. **Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak merekrut pekerja anak di Indonesia.** Sebesar 58 persen dari jumlah keseluruhan pekerja anak usia 7-14 tahun bekerja di sektor ini, diikuti sektor jasa (27 persen) dan manufaktur (7 persen). Angka-angka ini sesuai dengan komposisi sektoral pasar tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan. Sekitar sepertiga anak-anak yang bekerja di sektor jasa (216.000 anak-anak secara absolut) merupakan anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRTA). Penggunaan PRTA ini dikarenakan tidak adanya peraturan atau mereka belum menjadi perhatian publik. Anak-anak, terutama anak perempuan, yang bekerja sebagai PRTA di balik pintu tertutup sangat rentan terhadap tindak kekerasan, dan karenanya dibutuhkan adanya prioritas kebijakan khusus.

4 Data utama yang digunakan untuk laporan ini, Survei Pekerja Anak di Indonesia (2009), tidak menyediakan informasi sub-nasional tentang pekerjaan dan pendidikan anak. Karenanya, perkiraan dalam gambar ini didasari pada data dari Survei Tenaga Kerja Nasional Indonesia (2009). Survei Tenaga Kerja Nasional ini tidak menyediakan informasi tentang anak-anak usia di bawah 10 tahun, dan karenanya angka perkiraan ini hanya mengacu pada anak-anak usia 10-14 tahun.

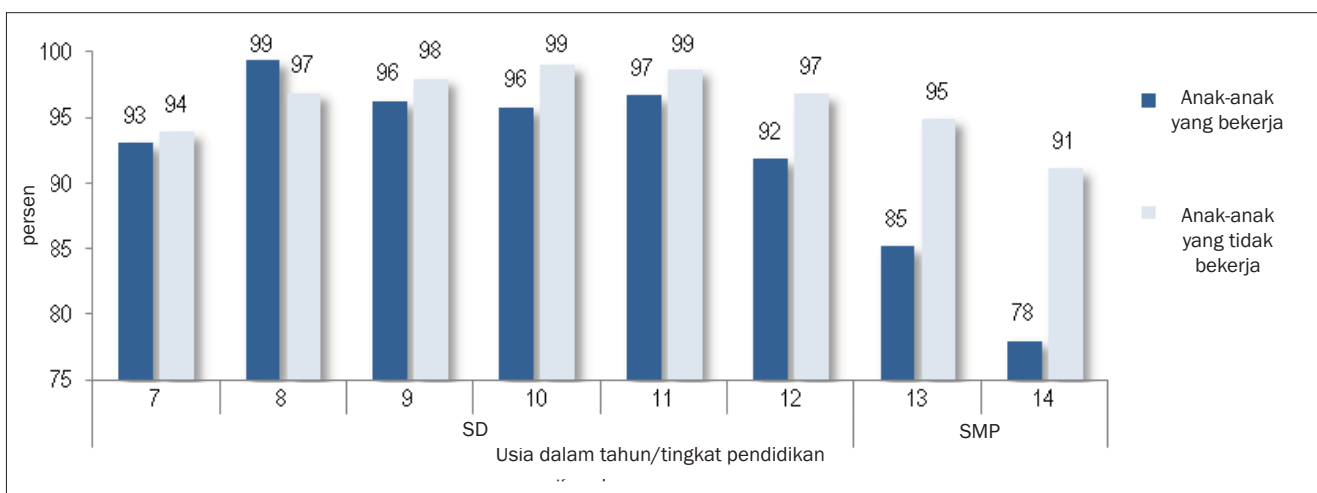
Figur 2. Sektor dan status anak-anak yang bekerja, kelompok usia 7-14 tahun



Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Pekerja Anak di Indonesia, 2009.

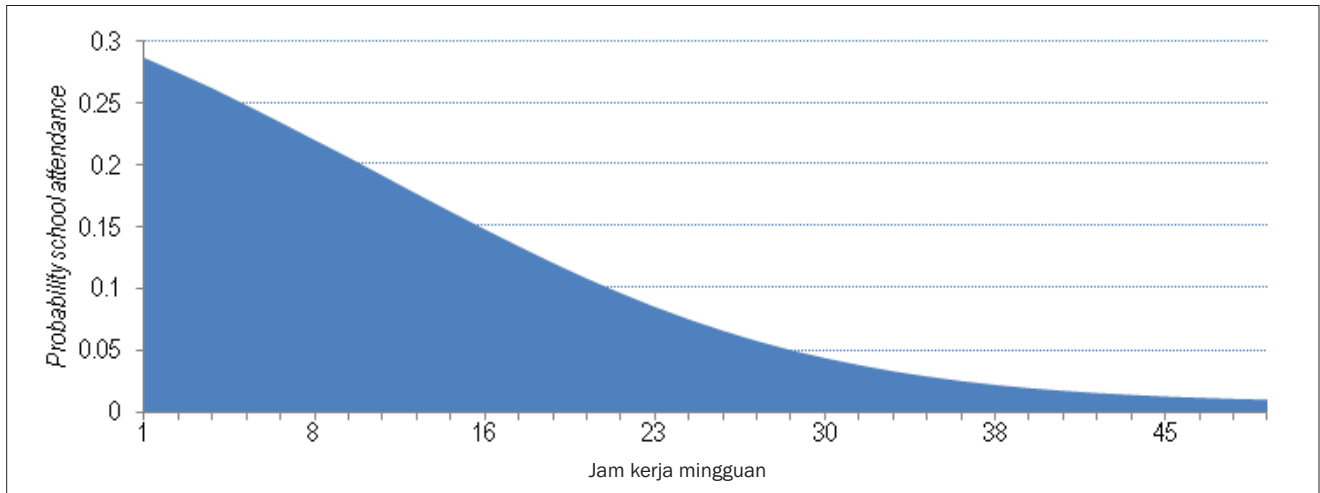
8. **Hampir semua anak yang aktif secara ekonomi bekerja tanpa upah untuk keluarga mereka.** Secara keseluruhan, 96 persen anak-anak bekerja untuk keluarga mereka. Kendati demikian, mereka umumnya dijumpai melakukan pekerjaan dalam kondisi berbahaya. Secara keseluruhan, 985.000 anak-anak usia 5-14 tahun, atau 44 persen dari jumlah keseluruhan anak-anak yang bekerja, terpapar kondisi berbahaya seperti menggunakan benda-benda berbahaya, terpapar debu atau uap, cuaca dingin atau panas yang ekstrim, api dan gas, bahan kimia, tingkat ketinggian yang berbahaya serta menggunakan mesin dan peralatan berbahaya. Paparan terhadap kondisi berbahaya ini tampaknya tergantung pada sektor di mana mereka bekerja. Paparan tertinggi adalah di sektor pertanian dan manufaktur: sekitar separuh anak-anak di sektor-sektor ini terpapar minimal satu kondisi berbahaya.
9. **Pekerjaan yang dilakukan anak terkait dengan pendidikan yang dikompromikan di Indonesia.** Kendati sebagian besar (87 persen) pekerja anak juga bersekolah, namun mereka masih tertinggal di dibandingkan dengan murid lain yang tidak bekerja dalam hal absensi di sekolah. Ini menunjukkan adanya kaitan antara perburuhan anak dengan Pendidikan untuk Semua. Maka tidaklah mengherankan jika tingkat kehadiran di sekolah berhubungan secara negatif, tidak saja dengan keterlibatan mereka dalam pekerjaan namun juga waktu yang sebenarnya dipergunakan untuk bekerja. Anak-anak yang bekerja juga tertinggal dibandingkan dengan murid lain yang tidak bekerja dalam hal kemajuan nilai pelajaran. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari kinerja yang buruk. Hasil ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi pekerja anak dalam mengikuti perkembangan di sekolah dibandingkan mereka yang tidak dibebani dengan tanggung jawab pekerjaan.

Figur 3. Tingkat kehadiran di sekolah, menurut status pekerjaan dan usia



Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Pekerja Anak di Indonesia, 2009.

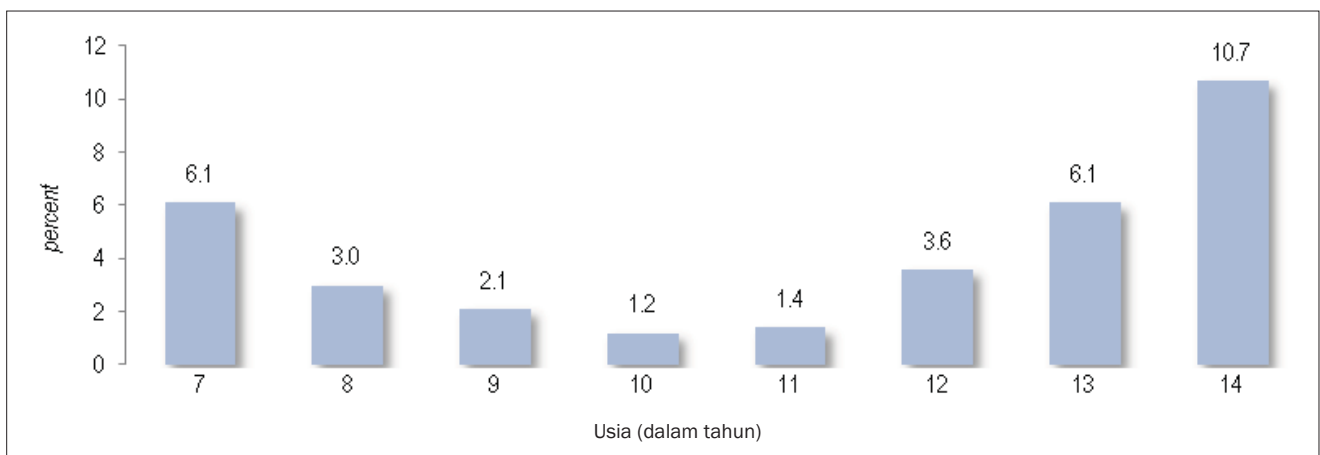
Figur 4. Jam kerja dan kehadiran di sekolah (perkiraan non-parametris)



Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Pekerja Anak di Indonesia, 2009.

10. **Banyak anak-anak putus sekolah di Indonesia, sebagian dikarenakan kebutuhan kerja.** Sekitar satu juta anak usia 10-14 tahun putus sekolah pada tahun 2009. Hampir dua pertiga dari mereka terlibat dalam kegiatan yang produktif, yaitu bekerja, melakukan tugas rumah tangga atau keduanya. Kebutuhan belajar untuk kelompok ini sangat penting: sekitar seperempat anak putus sekolah dalam kelompok usia 10-14 tahun menderita apa yang diistilahkan UNESCO sebagai “kemiskinan pendidikan”, yaitu hanya mengenyam pendidikan kurang dari empat tahun, masa belajar minimum yang dinilai UNESCO diperlukan untuk memperoleh keterampilan dasar membaca. Angka-angka ini memperlihatkan pentingnya upaya untuk memperluas dan mempercepat pemberian peluang pendidikan kedua dan menyediakan layanan-layanan lain yang dapat memperbaiki pilihan kehidupan anak-anak.

Figur 5. Anak-anak putus sekolah, menurut usia



11. **Belum dibahas hingga tahap ini adalah tingkat di mana jenis-jenis pekerja anak di Indonesia termasuk dalam “perburuhan anak” yang perlu dihapus.** Pertanyaan ini penting agar dapat memprioritaskan dan menargetkan respons kebijakan terhadap jenis-jenis pekerjaan anak. Menurut Undang-Undang (UU) No. 13 tentang Ketenagakerjaan,⁵ anak-anak di bawah usia 13 tahun dilarang bekerja, sedangkan anak-anak usia 13 hingga 15 tahun hanya diperbolehkan melakukan “pekerjaan ringan” yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial mereka (Pasal 69).⁶ Semua anak dilarang melakukan “bentuk-

5 Indonesia, UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003 (UU No. 13 tanggal 25 Maret 2003), <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/64764/65275/E03IDN01.htm#c1>.

6 Pengecualian lain diberikan untuk pekerja anak usia 14 tahun ke atas yang terkait dengan sekolah atau pelatihan (Pasal 70) dan pekerja anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka (Pasal 71). Kategori kedua ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No. 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat Mereka.

bentuk terburuk” dari pekerjaan untuk anak (Pasal 74).⁷ Oleh karena itu, berdasarkan perkiraan lengkap tentang perburuhan anak sesuai UU nasional ini, kita perlu melihat keseluruhan anak usia 5-12 tahun yang bekerja, serta semua anak usia 13-14 tahun yang melakukan pekerjaan biasa (yaitu pekerjaan tidak ringan) dan semua anak usia 15-17 tahun yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Gambar 6).

Figur 6. Kerangka kerja untuk mengidentifikasi perburuhan anak di Indonesia secara statistik

Kelompok usia	Pekerjaan ringan	Pekerjaan biasa	Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	
			Pekerjaan berbahaya	Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, selain dari pekerjaan berbahaya
Anak-anak di bawah usia minimum yang ditetapkan untuk pekerjaan ringan (kelompok usia 5-12 tahun)	Pekerjaan di bawah usia kerja minimum untuk pekerjaan ringan	Pekerjaan di bawah usia kerja minimum yang umum	Segala jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.	Anak-anak yang diperdagangkan untuk bekerja; kerja paksa dan ikatan kerja akibat lilitan hutang; eksploitasi anak-anak secara seksual dan komersial; pemakaian anak-anak untuk kegiatan ilegal dan konflik bersenjata
Anak-anak dalam kisaran usia yang ditetapkan untuk pekerjaan ringan (kelompok usia 13-14 tahun)				
Anak-anak dalam atau di atas usia kerja minimum yang bersifat umum (kelompok usia 15-17 tahun)				

Menunjukkan kegiatan yang tidak dianggap sebagai perburuhan anak
 Menunjukkan perburuhan anak sebagaimana diatur dalam UU Indonesia

7 Pasal 74 UU No.13 tentang Ketenagakerjaan berisi daftar bentuk-bentuk terburuk berikut ini: (a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; (b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; (c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/ata (d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Pasal 74 juga menyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak akan ditetapkan dengan Kepmen. Bentuk-bentuk terburuk juga diuraikan dalam Kepmen selanjutnya tentang pekerjaan yang mengganggu kesehatan, keselamatan dan moral anak (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/MEN/2003 tentang Pekerjaan yang Mengganggu Kesehatan, keselamatan dan Moral Anak). Jenis-jenis pekerjaan yang disebutkan termasuk pekerjaan yang menggunakan mesin, peralatan berat, pekerjaan di mana terdapat bahaya fisik, kimiawi, biologis atau yang sifatnya berbahaya. Pekerjaan yang menghambat moral anak-anak termasuk pekerjaan di bar, diskotik dan sebagainya. Tempat-tempat kerja berbahaya merupakan tempat-tempat yang dapat dipergunakan untuk prostitusi, promosi alcohol serta obat-obatan untuk menambah rangsangan seks atau rokok.

12. **Pekerja anak yang diukur atas dasar ini sangat umum di Indonesia.**⁸ Hampir 1,4 juta anak-anak di bawah usia 13 tahun bekerja dan hampir 650.000 (13-14 tahun) anak-anak lainnya melakukan pekerjaan biasa (non-ringan) pada 2008. Sementara dua juta anak-anak yang lebih tua yaitu 15-17 tahun melakukan pekerjaan berbahaya. Karenanya, jumlah keseluruhan anak-anak dalam ketiga kategori usia ini (5-17 tahun) yang terlibat dalam perburuhan anak mencapai lebih dari 4 juta orang.

Tabel 2. Perkiraan keterlibatan pekerja anak, menurut UU nasional serta metode dan standar statistik internasional untuk mengukur perburuhan anak

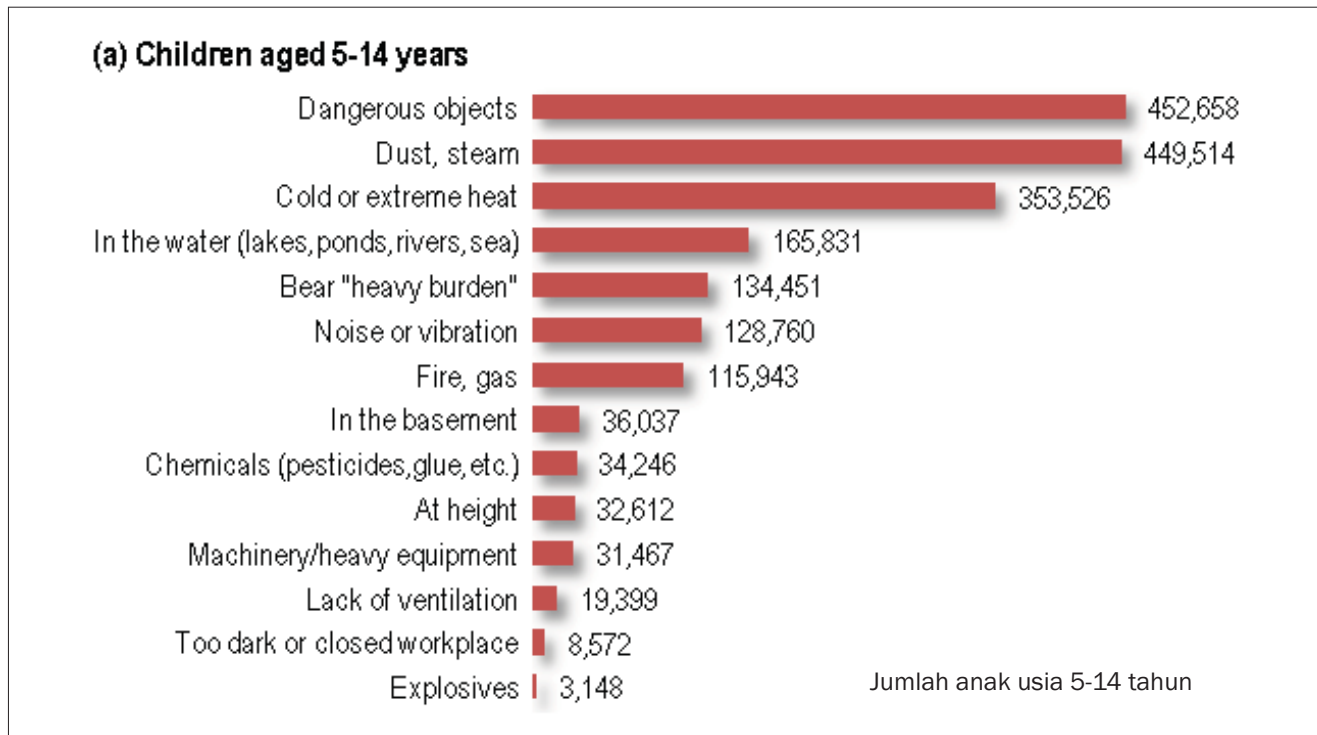
	(A) Anak usia 5-12 tahun yang bekerja		(B) Anak usia 13-14 tahun yang melakukan pekerjaan biasa (tidak ringan) ^(a)		(C)=(A)&(B) Anak usia 5-14 tahun yang terlibat dalam perburuhan anak		(D) Anak usia 15- 17 tahun yang melakukan pekerjaan berbahaya ^(b)		(E)=(A)&(B)&(D) Anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam perburuhan anak	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
Laki-laki	3,8	694,385	8,6	369,237	4,8	1,063,622	16,1	1,249,632	7,7	2,313,254
Perempuan	4,0	682,432	6,6	277,641	4,5	960,073	10,5	759,350	6,0	1,719,423
Kota	1,7	186,223	3,7	126,934	2,2	313,157	9,7	639,576	4,5	952,733
Desa	4,9	1,190,594	10,2	519,944	5,8	1,710,538	16,3	1,369,406	8,2	3,079,944
Total	3,9	1,376,817	7,6	646,878	4,6	2,023,695	13,4	2,008,982	6,9	4,032,677

Catatan: (a) Anak-anak yang melakukan pekerjaan biasa (yaitu pekerjaan tidak ringan) termasuk anak-anak yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu dan anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya tanpa memandang jam kerja mereka. (b) Termasuk anak-anak yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu dan anak-anak yang terpapar kondisi berbahaya telah dijelaskan di dalamnya

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Pekerja Anak di Indonesia, 2009.

13. **Pekerjaan berbahaya biasa dilakukan pekerja anak dalam spektrum usia 5-17 tahun di Indonesia.** Pekerjaan berbahaya yang dilakukan anak-anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus. Dalam kelompok usia 5-14 tahun – lebih dari 985.000 anak, atau hampir separuh dari keseluruhan pekerja anak dalam kelompok usia ini – terpapar minimal salah satu kondisi berbahaya sebagaimana tercantum dalam Gambar 7. Paparan terhadap benda-benda berbahaya (yang mempengaruhi 453.000 anak), debu atau uap (450.000 anak) dan cuaca dingin atau panas yang ekstrim (354.000 anak) merupakan jenis bahaya yang paling umum. Jumlah anak yang lebih sedikit, namun tidak boleh diabaikan, dalam kelompok usia ini terpapar jenis bahaya serius lainnya seperti api dan gas (116.000), bahan kimia (34.000), tingkat ketinggian yang berbahaya (33.000) serta mesin dan peralatan berbahaya (32.000).

8 Dikarenakan hambatan data dan sifat bahasa yang terkandung dalam UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, menerjemahkan UU ini ke dalam bentuk statistik untuk tujuan pengkajian membutuhkan beberapa penyederhanaan: (1) Pekerjaan ringan hanya diukur berdasarkan batas jam yang tercantum dalam UU No. 13 (Pasal 69) (yaitu tiga jam atau kurang per hari) dan tidak berdasarkan kriteria pekerjaan ringan lain yang disebutkan dalam UU tersebut. (2) Pengecualian untuk pekerjaan yang terkait dengan pendidikan atau pelatihan (Pasal 70) dan untuk pekerjaan yang dilakukan guna mengembangkan bakat dan minat mereka (Pasal 71), tidak dianggap dalam menilai perburuhan anak secara statistik. (3) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Pasal 74) dibatasi untuk tujuan pengkajian hanya pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak, kategori yang dianggap ILO sebagai "pekerjaan berbahaya". Bentuk-bentuk terburuk lain disebutkan dalam Pasal 74, secara kolektif dianggap ILO sebagai "bentuk-bentuk terburuk selain berbahaya" tidak dianggap dalam perkiraan pekerja anak. (4) Pekerjaan berbahaya diukur hanya sesuai dengan kondisi berbahaya fisik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan No. Kep.235/MEN/2003 (yaitu pekerjaan yang melibatkan pemakaian mesin, alat berat, pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, kimiawi, biologis atau yang sifatnya berbahaya) dan tidak sesuai dengan bahaya moral yang disebutkan dalam keputusan tersebut.

Figur 7. Jumlah anak-anak yang terpapar bahaya pekerjaan tertentu, menurut kelompok usia dan jenis bahaya

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Pekerja Anak di Indonesia, 2009.

14. **Bukti ekonometri menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan atau sekolah:**

- ♦ *Usia.* Analisis ini memperlihatkan bahwa kemungkinan anak bekerja meningkat seiring pertambahan usia. Informasi yang tersedia tidak cukup untuk memberi pandangan yang tepat tentang relatif pentingnya dua alasan yang mendasari hal ini, yaitu meningkatnya biaya sekolah seiring dengan peningkatan usia anak, dan kurangnya akses ke sekolah setelah tingkat SD.
- ♦ *Jenis kelamin.* Keputusan orangtua untuk melibatkan anak mereka ke sekolah atau bekerja tampaknya juga dipengaruhi oleh pertimbangan gender di Indonesia. Dengan latar belakang penghasilan rumah tangga yang tetap, pendidikan orangtua dan faktor-faktor terkait lainnya mengakibatkan anak laki-laki lebih mungkin bekerja ketimbang bersekolah secara eksklusif, dibandingkan dengan anak perempuan.
- ♦ *Pendidikan kepala keluarga.* Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga maka semakin tinggi pula kemungkinan anak mereka secara eksklusif bersekolah dan semakin kecil kemungkinannya mereka bekerja. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah orangtua yang lebih berpendidikan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang upaya untuk mengembalikan anak mereka ke sekolah, dan/atau memiliki posisi yang lebih baik untuk membantu anak-anak mereka memperoleh potensi penghasilan melalui dunia pendidikan.
- ♦ *Penghasilan rumah tangga.* Tingkat penghasilan rumah tangga juga tampak memainkan peran dalam keputusan tentang pekerjaan dan sekolah anak. Anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera lebih mungkin bersekolah dan tidak harus bekerja. Hasil-hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penghasilan atau produktivitas anak-anak dapat memainkan peran penting dalam strategi kelangsungan hidup rumah tangga di kalangan keluarga berpenghasilan rendah.
- ♦ *Lokasi tempat tinggal.* Lokasi tempat tinggal anak-anak mempengaruhi pemanfaatan waktu mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis daerah sasaran untuk mengurangi pekerja anak dan meningkatkan partisipasi mereka di sekolah. Apabila faktor-faktor yang ada saat ini

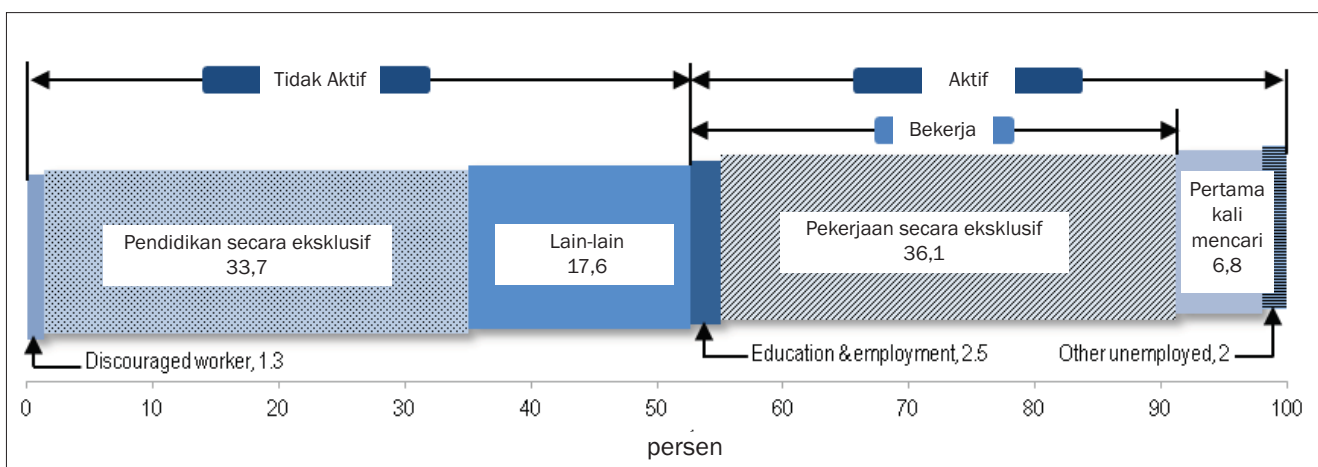
dipertahankan, maka anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan kemungkinan kecil akan bekerja dan kemungkinan besar akan bersekolah. Daerah tempat tinggal juga mempengaruhi pembagian waktu antara pekerjaan dengan sekolah; anak-anak yang tinggal di Jakarta menghadapi risiko yang lebih kecil untuk bekerja secara eksklusif dibandingkan anak-anak di daerah-daerah lain.

- 15 **Namun perburuhan anak merupakan fenomena yang rumit dan faktor-faktor yang disebutkan di atas tentunya hanya mewakili sebagian faktor penentu yang ada.** Data yang lebih baik dan analisis yang lebih mendalam dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengapa anak-anak terlibat dalam pekerjaan. Informasi lebih lanjut tentang ketersediaan infrastruktur, mutu sekolah, akses ke pasar kredit, cakupan skema perlindungan sosial sangat diperlukan. Keputusan tentang pekerjaan dan sekolah anak-anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya, serta pemahaman yang lebih baik juga dibutuhkan tentang peran faktor sosial budaya.

Bagian 2. Memahami pekerja muda

16. **Kaum muda yang memasuki pasar tenaga kerja menghadapi berbagai tantangan di Indonesia.** Baik pemuda kota maupun desa menghadapi masalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi, dan bagi sebagian besar orang, masa pengangguran ini berlangsung lama. Kaum muda yang berpendidikan mengalami kesulitan tertentu dalam memperoleh pekerjaan. Setengah pengangguran juga merupakan masalah serius, karena banyak pemuda yang tidak ingin menganggur terpaksa menerima pekerjaan tidak tetap, biasanya di sektor pertanian. Banyak kaum muda, terutama perempuan muda, tidak bekerja ataupun bersekolah. Mereka yang berhasil memperoleh pekerjaan melakukan pekerjaan yang tidak aman, tidak membutuhkan keterampilan tertentu dan di sektor informal yang menawarkan upah kecil tanpa jaminan sosial atau tunjangan. Hal ini sering terjadi pada perempuan muda, pemuda desa dan pemuda dari kawasan luar Jawa. Persoalan-persoalan ini diuraikan secara lebih terperinci di bawah ini.
17. **Jumlah kaum muda Indonesia usia 15–24 tahun yang bekerja dan menganggur hampir sama.** Gambar 8, yang berisi ringkasan tentang status kegiatan kaum muda dalam kelompok usia ini, menunjukkan bahwa sebagian besar kaum muda yang tidak aktif (34 persen dari keseluruhan kaum muda) secara eksklusif mengenyam pendidikan, sedangkan kelompok kaum muda yang tidak aktif dan tidak bersekolah juga terbilang tinggi (19 persen dari keseluruhan kaum muda). Hanya sedikit dari kelompok terakhir ini yang terdiri dari pekerja yang patah semangat (*discouraged workers*) (2 persen dari keseluruhan kaum muda), dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kaum muda yang ingin bekerja sudah ada di pasar tenaga kerja dan aktif mencari pekerjaan. Di kalangan kaum muda yang aktif, proporsi terbesar (36 persen dari keseluruhan kaum muda) bekerja secara eksklusif. Meskipun demikian, mereka yang menganggur tetap tidak dapat diabaikan (9 persen dari keseluruhan kaum muda). Pangsa terbesar pengangguran muda (7 persen dari keseluruhan kaum muda) adalah mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan. Pada akhirnya, Gambar 8 menunjukkan bahwa pekerjaan dan pendidikan merupakan kegiatan yang sangat eksklusif: hanya sebagian kaum muda (3 persen) yang mampu melakukan kedua jenis kegiatan ini secara bersamaan.

Figur 8. Dekomposisi penduduk muda menurut status kegiatan



18. **Ada perbedaan besar dalam situasi pasar tenaga kerja untuk kaum muda menurut jenis kelamin, usia, tempat tinggal dan lokasi mereka.** Tabel 3, yang melaporkan indikator rata-rata pasar tenaga kerja utama bagi kaum muda Indonesia, memaparkan hal berikut ini.

- ♦ *Usia*. Indikator pasar tenaga kerja secara keseluruhan menyembunyikan perbedaan besar dalam status pasar tenaga kerja menurut usia. Hal ini tidak mengherankan, karena kisaran usia 15–24 tahun merupakan masa transisi. Perbandingan remaja (15-19 tahun) dan dewasa muda (20-24 tahun) mengungkapkan perbedaan besar dalam partisipasi pendidikan, di mana hanya sedikit dari mereka yang melanjutkan pendidikan hingga dewasa. Dewasa muda banyak diwakilkan dalam angkatan kerja (walaupun remaja yang ada dalam angkatan kerja kemungkinan besar tidak memperoleh pekerjaan), juga kemungkinan besar tidak aktif dan putus sekolah.
- ♦ *Jenis kelamin*. Perbedaan terbesar antara pemuda dan pemudi adalah tingkat partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Laki-laki muda lebih mungkin aktif secara ekonomi, sementara dalam jumlah yang lebih besar, kaum perempuan muda cenderung tidak aktif dan tidak bersekolah. Tampaknya mereka memikul tanggung jawab rumah tangga yang biasanya diberikan kepada perempuan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan lain dalam status laki-laki dan perempuan muda terbilang lebih kecil. Pangsa laki-laki dan perempuan muda yang bersekolah hampir sama, dan untuk perempuan dan laki-laki muda yang aktif secara ekonomi, hasil pasar tenaga kerja tidak banyak berbeda (perempuan muda menghadapi risiko menganggur yang sedikit lebih besar).
- ♦ *Tempat tinggal*. Status pasar tenaga kerja sangat bervariasi tergantung lokasi tempat tinggal. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perbedaan dalam sifat pasar tenaga kerja di kota maupun desa. Kendati partisipasi kaum muda di pasar tenaga kerja sedikit berbeda antara desa dan kota, namun pemuda kota yang aktif menghadapi risiko menganggur yang lebih besar. Meskipun demikian, pengangguran di desa juga relatif tinggi. Perbedaan dalam status kaum muda kota dan desa *di luar* pasar tenaga kerja bahkan lebih besar. Pemuda kota yang tidak aktif kemungkinan besar akan melanjutkan pendidikan mereka, sementara pemuda desa yang tidak aktif kemungkinan besar tidak bekerja dan putus sekolah.
- ♦ *Kawasan*. Perbedaan secara regional dalam hal status kegiatan kaum muda juga penting di Indonesia (tidak diperlihatkan). Jakarta merupakan daerah di mana kaum muda kemungkinan besar akan aktif secara ekonomi dan melanjutkan pendidikan mereka, sementara di daerah, kaum muda kemungkinan besar tidak aktif dan tidak bersekolah. Di kalangan kaum muda aktif, Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di kalangan muda.

Tabel 3. Indikator rata-rata pasar tenaga kerja, mereka yang berusia 15-24 tahun, menurut tempat tinggal dan jenis kelamin

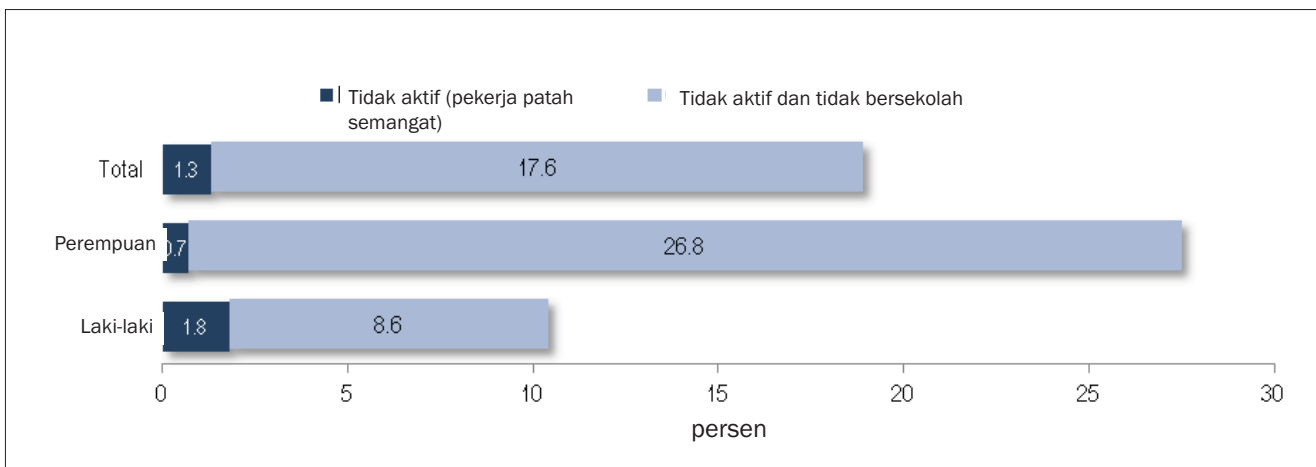
		Partisipasi dalam pasar tenaga kerja (% penduduk)	Partisipasi Dalam pendidikan (% penduduk)	Tidak aktif dan putus sekolah (% penduduk)	Tingkat kerja (% aktif)	Tingkat pengangguran (% aktif)	Tingkat pengangguran relaks(a) (% terus aktif)
Tempat tinggal	Kota	46,9	42,6	13,3	78,5	21,5	22,8
	Desa	47,8	31,6	23,7	83,9	16,1	19,0
Jenis kelamin	Laki-laki	55,9	36,9	10,5	82,1	17,9	20,4
	Perempuan	38,7	36,5	27,5	80,4	19,6	21,1
Kisaran usia	15-19	31,9	56,0	15,6	76,1	23,9	26,9
	20-24	66,6	12,6	22,9	84,6	15,4	16,9
Total		47,4	36,7	18,9	81,4	18,6	20,7

Catatan: (a) Tingkat pengangguran relaks mencakup angkatan kerja yang sedang menganggur dan pekerja patah semangat yang bersedia untuk bekerja. Tingkat pengangguran relaks adalah jumlah angkatan kerja yang menganggur dan pekerja patah semangat yang bersedia untuk bekerja yang disajikan dalam presentase penduduk aktif. Pekerja patah semangat adalah mereka yang sedang tidak bekerja, tidak sedang mencari pekerjaan dan tidak siap untuk usaha karena mereka merasa sudah patah semangat tentang prospek keberhasilan mereka, tapi mau menerima pekerjaan bila ditawarkan. Penduduk aktif ekspansi terdiri dari pekerja patah semangat dan penduduk aktif.

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), Agustus 2010.

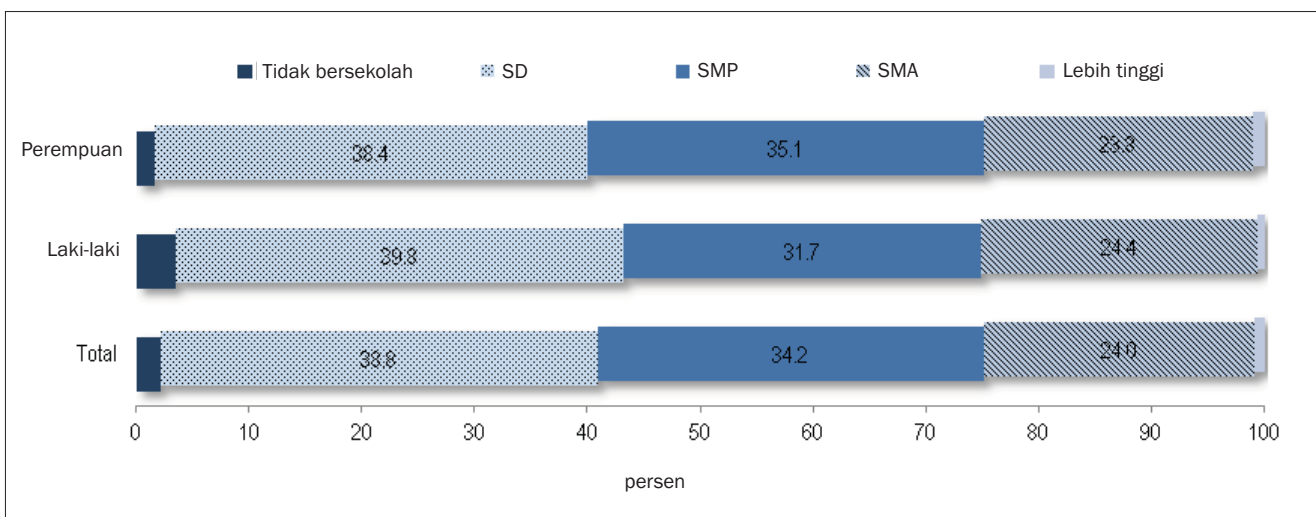
19. **Pangsa kaum muda Indonesia yang sangat besar –terutama perempuan muda – tidak bekerja atau bersekolah.** Hampir 19 persen dari keseluruhan jumlah kaum muda tidak aktif dan tidak bersekolah. Ini menunjukkan besarnya potensi produktif yang hilang dan hambatan terhadap pertumbuhan mereka. Perempuan muda yang tidak aktif sangat tinggi: jumlah perempuan muda yang tidak aktif dan tidak bersekolah adalah tiga kali lipat laki-laki muda. Perbedaan ini bukan hasil dari besarnya jumlah perempuan muda yang putus sekolah, di mana tingkat partisipasi pendidikan secara virtual sama untuk laki-laki dan perempuan muda. Atau dikarenakan oleh lebih tingginya tingkat patah semangat di kalangan perempuan muda (Gambar 9). Namun, besarnya pangsa perempuan muda yang tidak aktif dan putus sekolah tampaknya lebih terkait dengan kecenderungan budaya di mana mereka tidak perlu bekerja agar dapat melaksanakan tugas rumah tangga dan mengasuh anak-anak.

Figur 9. Penduduk tidak aktif dan tidak bersekolah (%penduduk usia 15-24 tahun), menurut status dan jenis kelamin



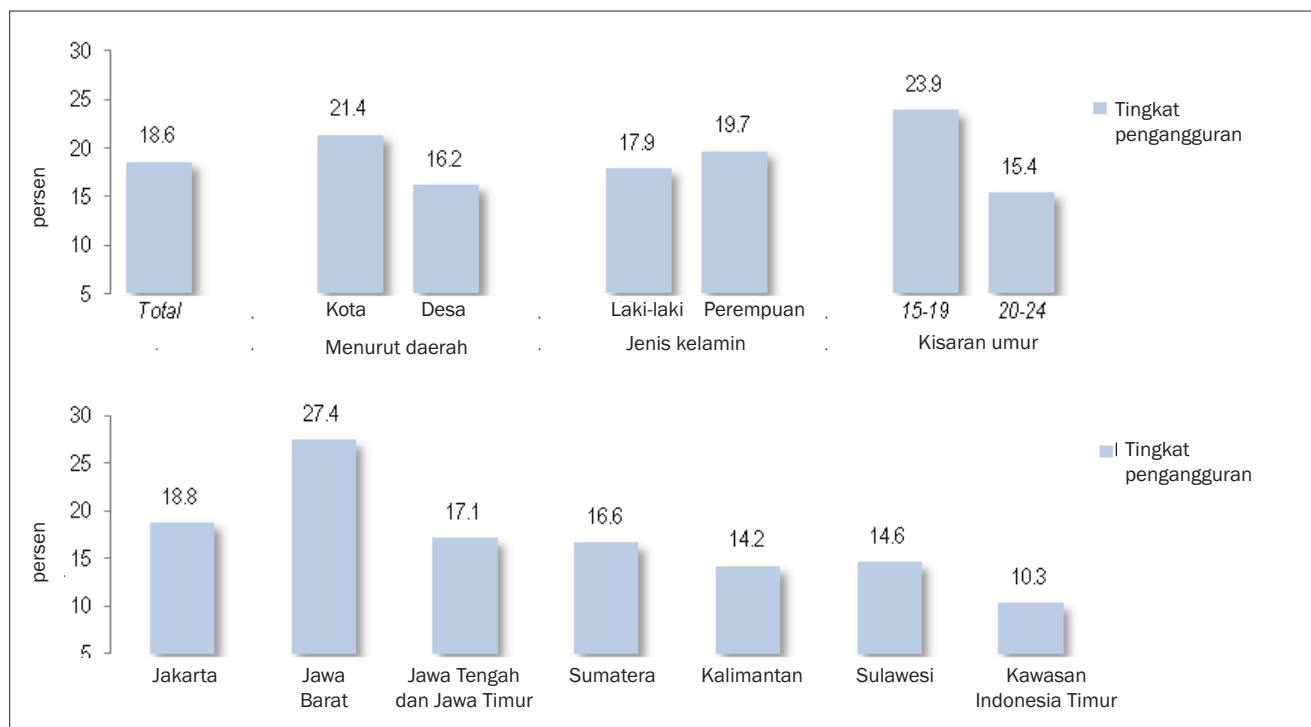
20. **Banyak kaum muda tidak aktif dan tidak bersekolah kendati memiliki permodalan manusia yang tinggi.** Fakta ini menunjukkan hilangnya produktivitas yang diwakili oleh kelompok yang tidak aktif dan tidak bersekolah. Seperti yang dilaporkan dalam Gambar 10, lebih dari separuh kelompok ini minimal memiliki tingkat pendidikan SMP sedangkan seperempatnya minimal berpendidikan SMA. Perempuan muda yang tidak aktif dan putus sekolah, yang merupakan pangsa terbesar dalam kelompok muda ini, *tidak memiliki* tingkat prestasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki mereka.

Figur 10. Dekomposisi penduduk muda yang tidak aktif dan tidak bersekolah menurut tingkat pendidikan, menurut jenis kelamin



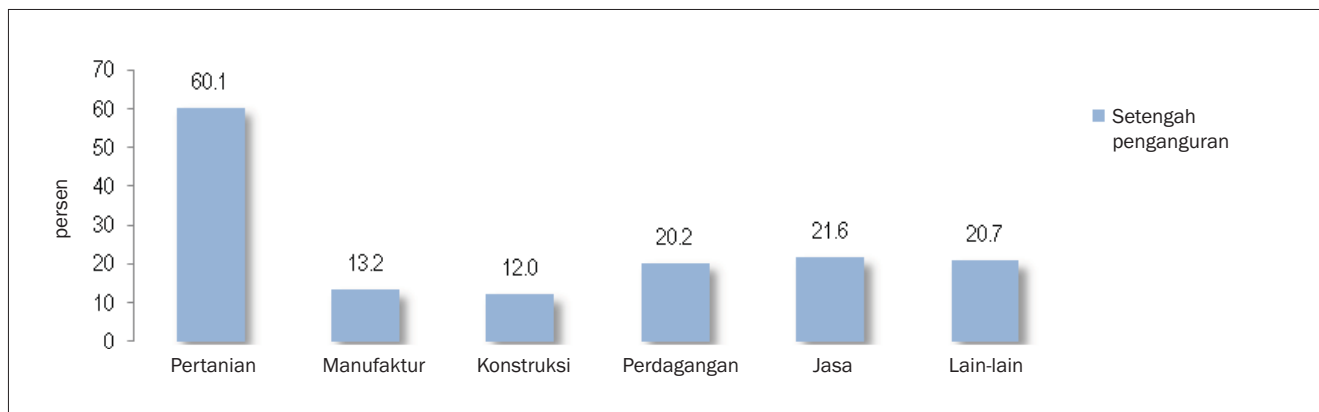
21. **Pemuda kota dan desa mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi.** Secara keseluruhan, hampir seperlima (19 persen) kaum muda dalam angkatan kerja menganggur, yaitu lima kali lebih tinggi dibandingkan pekerja dewasa. Sekitar dua pertiga dari mereka sedang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan kesulitan besar yang dihadapi kaum muda dalam memperoleh “pijakan awal” dalam pasar tenaga kerja. Pengangguran di kalangan muda tidak terbatas pada daerah perkotaan saja. Walaupun pengangguran di daerah perkotaan sekitar seperempat lebih tinggi dibandingkan desa, namun tingkat pengangguran untuk kaum muda pedesaan mencapai lebih dari 16 persen. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan sektor pertanian menyerap sepenuhnya angkatan kerja muda di desa dalam konteks Indonesia.

Figur 11. Tingkat pengangguran (presentase penduduk aktif usia 15-24 tahun), menurut tempat tinggal, jenis kelamin dan kisaran usia



22. **Pengangguran berlangsung lama bagi sebagian besar remaja.** Lebih dari separuh pengangguran muda sudah menganggur selama minimal 12 bulan, meningkat hampir dua pertiga dari jumlah kaum muda usia 20-24 tahun, dan 60 persen dari jumlah kaum muda di Sumatera dan Kawasan Indonesia Timur. Lamanya masa menganggur menunjukkan pentingnya upaya untuk menentukan faktor penyebab pengangguran. Arus keluar yang tinggi dan waktu istirahat yang pendek mungkin memperlihatkan pencarian kerja yang mereka “sukai” secara aktif di kalangan muda, sementara konsekuensi masa pengangguran yang lebih lama kemungkinan besar menunjukkan adanya masalah kebijakan yang lebih serius.

23. **Setengah pengangguran, ditetapkan sebagai bekerja kurang dari 35 jam per minggu, juga merupakan masalah kebijakan yang serius bagi kaum muda.** Hampir sepertiga dari keseluruhan kaum muda yang bekerja mengalami masalah setengah pengangguran berdasarkan ukuran ini. Hal ini menunjukkan pemanfaatan yang kurang terhadap kapasitas produktif kaum muda. Setengah pengangguran tampak terlihat jelas di daerah pedesaan (45 persen pemuda yang bekerja) dan di daerah-daerah luar Jakarta dan Jawa Barat (minimal 31 persen dari pemuda yang bekerja). Tingkat setengah pengangguran tertinggi adalah di sektor pertanian (Gambar 12). Hal ini menunjukkan peran sektor tersebut dalam menyerap pekerja masih belum dapat menjamin pekerjaan yang lebih baik di daerah lain.

Figur 12. Tingkat setengah pengangguran menurut sektor(a) (presentase penduduk usia 15-24 tahun yang bekerja), menurut sektor

Catatan: (a) Tingkat setengah pengangguran adalah jumlah pekerja dalam situasi setengah menganggur dalam presentase total pekerja. Seseorang dianggap setengah menganggur bila ia bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), Agustus 2010.

24. **Pangsa terbesar kaum muda yang bekerja di Indonesia masih bekerja di luar sektor formal.** Tabel 4, yang menguraikan tentang pekerja muda menurut formalitas (sebagaimana ditetapkan dalam Sakernas),⁹ menunjukkan bahwa 56 persen pemuda yang bekerja dijumpai di sektor informal. Meskipun demikian kaum muda masih lebih baik dalam hal ini ketimbang pekerja dewasa. Formalitas pekerjaan mungkin menjadi ukuran terbaik terhadap mutu pekerjaan. Formalitas umumnya dihubungkan dengan stabilitas pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi serta akses yang lebih baik terhadap tunjangan lainnya seperti pensiun dan layanan kesehatan. Di sisi lain, pekerjaan di sektor informal di Indonesia terkait dengan hasil rata-rata pasar tenaga kerja yang lebih buruk.¹⁰
- 25 **Informalitas lebih sering dijumpai di daerah pedesaan dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa.** Hal ini sekali lagi menunjukkan perbedaan dalam pasar tenaga kerja di kota dan desa serta kondisi pasar tenaga kerja antar daerah. Secara virtual, seluruh pekerja muda dalam sektor pertanian merupakan pekerjaan yang bersifat informal. Sebaliknya, hampir tiga perempat pekerja muda di sektor jasa, sektor terpenting kedua bagi kaum muda di Indonesia, bersifat formal.

Tabel 4. Formalitas pekerjaan,(a) presentase pekerja usia 15-24 tahun, menurut tempat tinggal dan daerah

Kategori	Total	Tempat Tinggal		Daerah						
		Kota	Desa	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Kawasan Indonesia Timur
Formal(b)	44.3	68,2	25,4	80,2	60,5	46,2	33,4	38,2	31,3	18,3
Informal(c)	55.7	31,8	74,7	19,8	39,5	53,8	66,6	61,8	68,7	81,7
Total	100.0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan:

- (a) Definisi ini didasari pada konsep sektor informal dalam Survei Angkatan Kerja Indonesia (Sakernas). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Badan Pusat Statistik (BPS), Kertas Kerja Nasional Indonesia tentang Sektor informal dan Penilaiannya, Mei 2008.
- (b) Pekerjaan formal mencakup kategori-kategori berikut ini: (1) Pekerja mandiri yang melakukan pekerjaan profesional, teknis dan sejenisnya; administratif dan manajerial, juru tulis dan pekerjaan terkait; (2) Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara atau pekerja tanpa upah,

⁹ Definisi didasari pada konsep sektor informal dalam Survei Angkatan Kerja Indonesia (Sakernas). Untuk informasi lebih lanjut, lihat BPS-Statistik Indonesia, Kertas Kerja Nasional Indonesia tentang Sektor informal dan Penilaiannya, Mei 2008.

¹⁰ Bank Dunia, Indonesia Jobs Report 2009.

yang melakukan pekerjaan profesional, teknis dan sejenisnya; administratif dan manajerial, juru tulis dan sejenisnya, penjualan, servis, produksi dan sejenisnya, operator alat transportasi dan buruh; (3) semua pengusaha yang dibantu oleh pekerja tetap; (4) semua pekerja dan buruh harian di sektor pertanian yang melakukan pekerjaan profesional, teknis dan pekerjaan terkait; pekerjaan administratif dan manajerial; juru tulis dan pekerjaan terkait; tenaga penjualan; produksi dan pekerja terkait; operator alat transportasi dan buruh; (5) Buruh harian non-pertanian yang melakukan pekerjaan profesional, teknis dan sejenisnya; pekerjaan administratif dan manajerial, juru tulis dan pekerjaan terkait.

- (c) Pekerjaan non-formal mencakup kategori berikut ini: (1) Pekerja mandiri yang bukan pekerjaan profesional, teknis dan sejenisnya; administratif dan manajerial, juru tulis dan pekerjaan terkait; (2) Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara atau pekerja tanpa upah, yang tidak melakukan pekerjaan profesional, teknis dan sejenisnya; administratif dan manajerial, juru tulis dan pekerjaan terkait, penjualan, servis, produksi dan sejenisnya, operator alat transportasi dan pekerjaan buruh; (3) semua pekerja dan buruh harian di sektor pertanian, yang melakukan pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan perburuan; (4) Buruh harian di sektor non-pertanian yang bukan pekerjaan profesional, teknis dan sejenisnya; administratif dan manajerial, juru tulis dan pekerjaan terkait; (5) semua pekerja tanpa upah.

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), Agustus 2010.

26. **Lebih dari satu dari dua pekerja muda di desa dijumpai bekerja di sektor pertanian.** Partisipasi mereka dalam pekerjaan pertanian sangat tinggi di daerah-daerah luar Pulau Jawa (yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur), di mana pangsa kaum muda di sektor pertanian berkisar antara 62 hingga 76 persen (Tabel 5). Di samping itu, berbagai bukti menunjukkan bahwa produktivitas dan profitabilitas di sektor *non-perkebunan* umumnya lebih baik dari sektor perkebunan, demikian pula dengan upah rata-rata dan kondisi kerja. Karenanya, memperluas lapangan kerja di sektor *non-perkebunan* untuk pekerja muda pedesaan sangat penting untuk meningkatkan hasil kerja mereka. Data yang diperoleh dari Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia pada tahun 2007 hingga 2010 menunjukkan bahwa hal ini terjadi secara gradual. Lapangan kerja di sektor non-perkebunan meningkat dari 42 menjadi 47 persen dari jumlah total lapangan kerja bagi pekerja muda di pedesaan selama periode ini.

Tabel 5. Pekerjaan di sektor non-perkebunan(a), presentase warga desa usia 15-24 tahun yang bekerja, menurut jenis kelamin

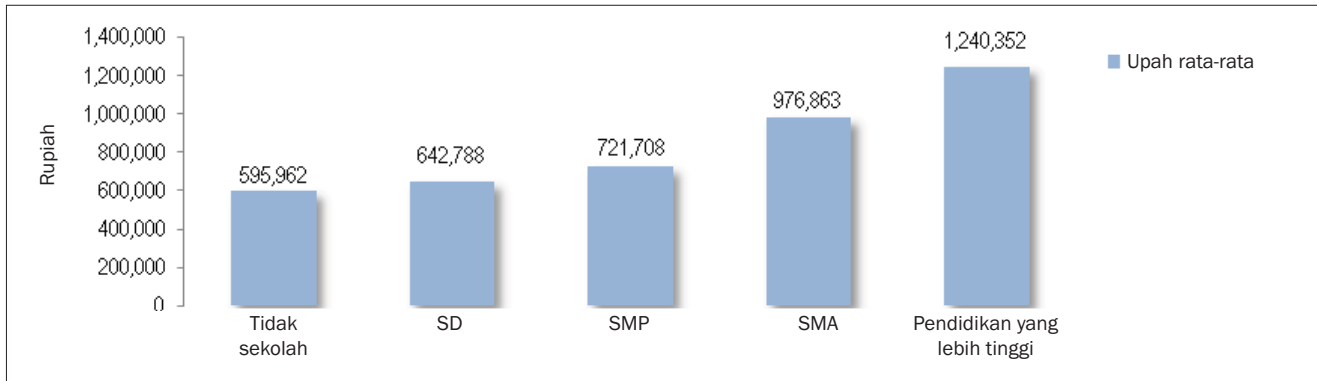
Kategori	Total	Daerah						
		Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Kawasan Indonesia Timur
Non-perkebunan	46.7	-	79,6	55,3	35,4	35,5	38,2	24,4
Perkebunan	53.3	-	20,4	44,7	64,6	64,5	61,8	75,6
Total	100	-	100	100	100	100	100	100

Catatan: (a) Pekerja non-perkebunan ditetapkan sebagai mereka yang bekerja di luar sektor pertanian.

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), Agustus 2010.

27. **Tingkat premi upah yang terkait dengan pendidikan sangat tinggi di Indonesia.** Gambar 13, yang melaporkan tentang upah rata-rata menurut tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari tingkat pendidikan sangat besar: seorang pemuda dengan tingkat pendidikan SD memperoleh upah delapan persen lebih besar dari rata-rata rekannya yang tidak berpendidikan. Upah untuk mereka yang berpendidikan lebih tinggi bahkan lebih besar: upah rata-rata lulusan SMP 12 persen lebih tinggi dibandingkan lulusan SD, upah rata-rata lulusan SMA 35 persen lebih tinggi dibandingkan lulusan SMP serta upah rata-rata mereka yang berpendidikan lebih tinggi 27 persen lebih besar dibandingkan lulusan SMA.

Figur 13. Upah rata-rata (dalam Rupiah)(a) pekerja muda,(b) menurut tingkat pendidikan

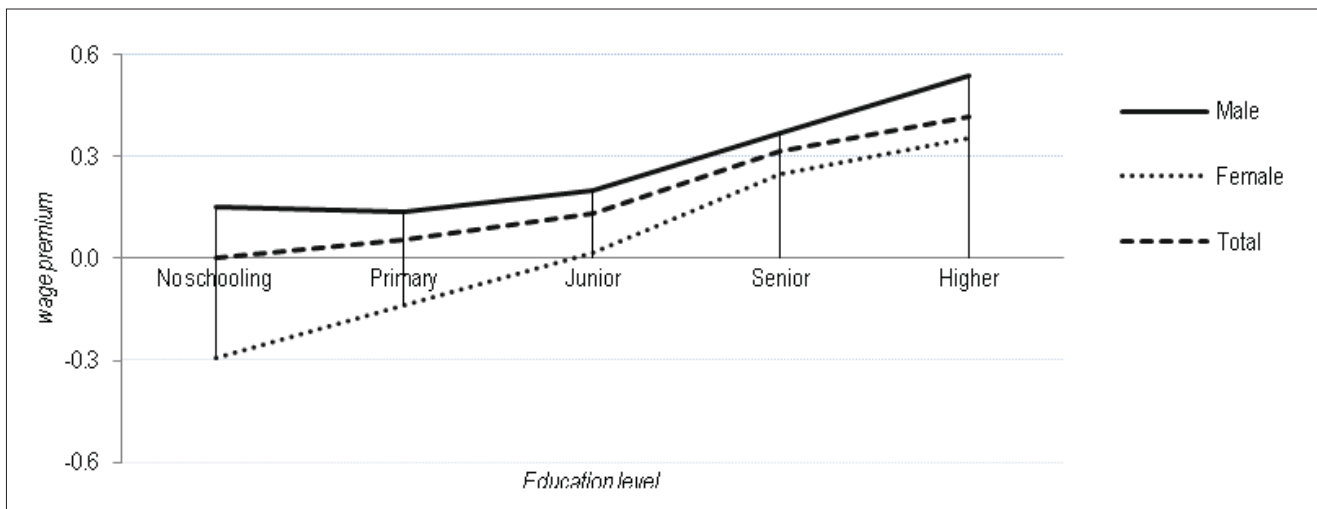


Catatan: (a) Upah rata-rata dihitung untuk semua pekerja muda non-pendidikan dengan upah yang tidak nol; (b) Hanya pekerja muda yang tidak berpendidikan yang dipertimbangkan.

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), 2009.

28. **Premi upah lebih tinggi untuk laki-laki muda dibandingkan perempuan muda.** Gambar 14 menggambarkan premi upah yang terkait dengan tingkat pendidikan yang dipisah menurut jenis kelamin. Gambar ini menunjukkan bahwa premi upah yang terkait dengan pendidikan yang dinikmati laki-laki muda jauh lebih tinggi dibandingkan premi upah yang dinikmati perempuan muda. Indikator lain dari kerugian relatif yang dihadapi perempuan muda di pasar tenaga kerja.

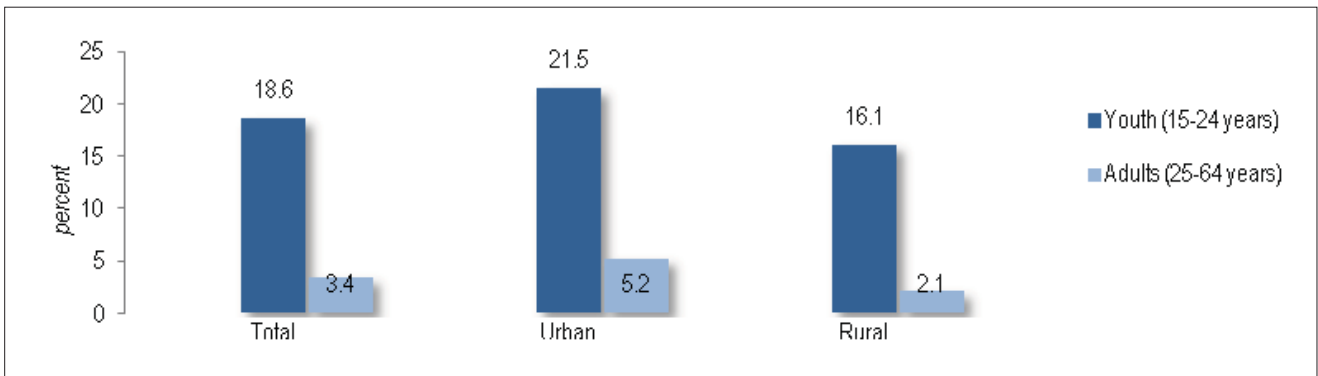
Figur 14. Premi upah menurut jenis kelamin, remaja usia 15-24, dibandingkan jumlah mereka yang tidak berpendidikan



Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), 2009.

29. **Tingkat pengangguran muda lebih dari lima kali tingkat pengangguran dewasa** (Gambar 15). Merupakan kecenderungan internasional umum bahwa tingkat pengangguran di kalangan muda lebih besar dibandingkan pengangguran generasi lebih tua, namun demikian, kesenjangan di Indonesia begitu besar. Sebagian besar penganggur muda adalah mereka yang pertama kali mencari pekerjaan dan tingkat pengangguran mereka sangat tinggi bila dibandingkan pekerja dewasa. Ini menunjukkan adanya hambatan besar dalam memperoleh dasar awal di pasar kerja.

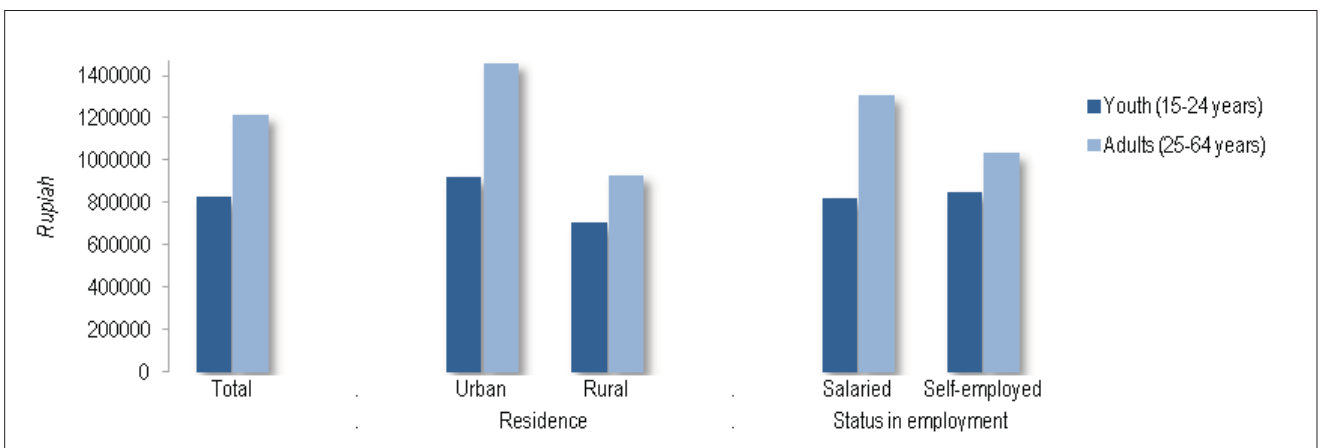
Figur 15. Perbedaan dalam pengangguran (presentase penduduk aktif) antara pekerja muda dengan pekerja dewasa



Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), Agustus 2010.

30. **Tingkat upah pekerja muda jauh lebih rendah dari pekerja dewasa, baik di kota maupun desa** (Gambar 16). Kesenjangan upah terjadi terutama dikarenakan adanya perbedaan penghasilan dari jenis-jenis pekerjaan berubah: walaupun jumlah pekerja dewasa lebih sedikit dibandingkan pekerja muda yang melakukan pekerjaan ini, tingkat upah rata-rata mereka jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja muda. Ini tentunya merupakan salah satu alasan penting mengapa peluang kerja baru banyak diberikan kepada pekerja muda, dan kemungkinan peralihan jenis pekerjaan menurun di saat pekerja tumbuh dewasa. Kesenjangan upah rata-rata antara kelompok muda dengan dewasa di bidang wirausaha jauh lebih kecil, namun masih menguntungkan pekerja dewasa (Gambar 16).

Figur 16. Perbedaan upah rata-rata(a)(dalam Rupiah), pekerja muda dan pekerja dewasa, menurut tempat tinggal dan status dalam pekerjaan

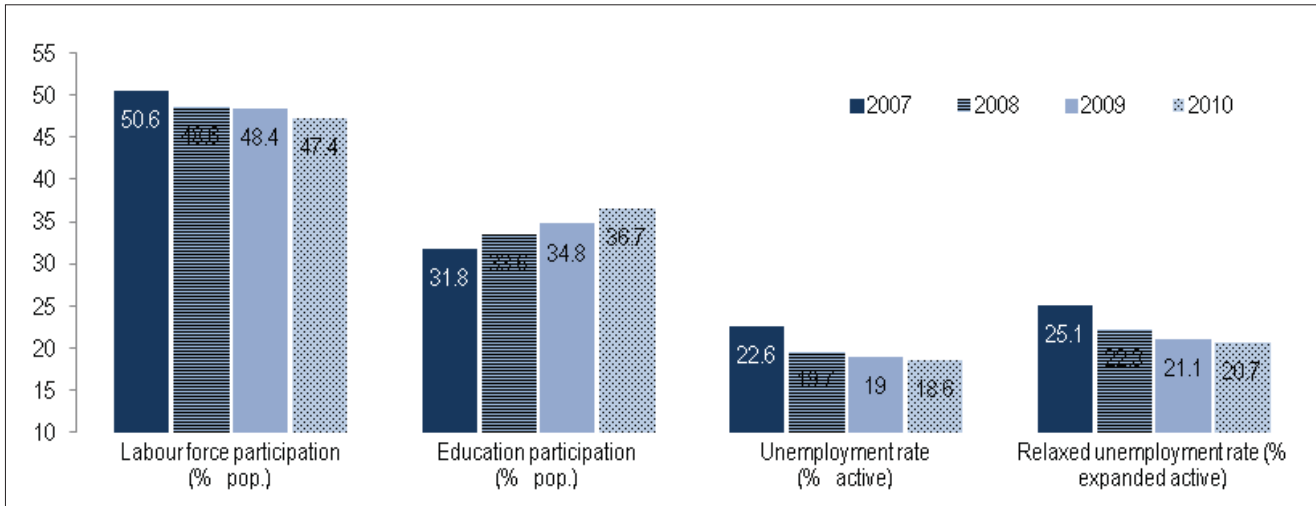


Catatan: (a) Upah rata-rata dihitung untuk pekerja muda dan pekerja dewasa yang memiliki upah tidak nol (non-zero).

Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia (Sakernas), Agustus 2010.

31. **Kecenderungan dalam indikator rata-rata pasar tenaga kerja untuk kaum muda menunjukkan situasi yang lebih baik, kendati terjadi krisis ekonomi global pada periode 2007-2010.** Perbandingan hasil survei angkatan kerja nasional periode 2007 hingga 2010 menunjukkan adanya kecenderungan yang mendasari gambaran statis tentang pasar tenaga kerja bagi kaum muda yang disajikan di atas. Partisipasi pendidikan meningkat sementara partisipasi tenaga kerja menurun selama periode ini. Ini menunjukkan bahwa kaum muda Indonesia memilih mengenyam pendidikan lebih lama dan bergabung dalam angkatan kerja kemudian, dengan konsekuensi positif yang jelas untuk tingkat modal manusia yang mereka bawa ke dalam angkatan kerja saat bergabung ke pasar tenaga kerja. Di samping itu, jumlah mereka yang sedang mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja sedikit menurun selama periode 2007-2010.

Figur 17. Kecenderungan dalam indikator rata-rata pasar tenaga kerja, 2007-2010



Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Tenaga kerja Nasional Indonesia, 2010 (Agustus), 2009 (Agustus), 2008(Agustus) dan 2007(Agustus).

Bagian 3. Merespons masalah pekerja anak dan pekerja muda

32. Bagian dari laporan ini menyajikan prioritas kebijakan untuk memerangi pekerja anak dan mempromosikan pekerja muda di Indonesia, berdasarkan bukti empiris yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya serta mengenai pelajaran yang diperoleh dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal laporan ini, pekerja anak dan pekerja muda sangat terkait erat. Ini menunjukkan pentingnya upaya untuk mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan, dengan menerapkan pendekatan siklus hidup (*lifecycle*).

Figur 18. Respons terpadu untuk masalah perburuhan anak dan pekerjaan remaja



33. Gambar 16 menggambarkan komponen-komponen utama dari respons terpadu terhadap masalah pekerja anak dan pekerja muda. Serangkaian kebijakan yang difokuskan pada anak-anak diperlukan untuk mempromosikan pendidikan sebagai alternatif bagi pekerja anak, dan selanjutnya, memastikan bahwa anak-anak memasuki usia dewasa dengan bekal keterampilan hidup mendasar yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan kehidupan praktis selanjutnya. Dasar ini menjadi sangat penting bagi keberhasilan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif dalam mempromosikan hasil kerja yang lebih baik bagi kaum muda, dan guna memastikan bahwa kaum muda berhasil beralih dari dunia pendidikan menuju pekerjaan yang layak di pasar tenaga kerja. Rantai sebab-akibat ini juga beroperasi secara terbalik: keberhasilan kerja kaum muda di pasar tenaga kerja dapat meningkatkan insentif keluarga untuk menginvestasikan pendidikan dini bagi anak-anak dalam siklus kehidupan mereka.
34. Serangkaian prioritas kebijakan khusus untuk merespons masalah pekerja anak dan pekerja muda dibahas dalam dua sub-bagian berikut ini.

Merrespons masalah pekerja anak

35. Perburuhan anak merupakan fenomena rumit yang membutuhkan respons kebijakan yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral. Bukti dari Indonesia dan negara lain¹¹ menunjukkan bahwa pilar kebijakan berikut ini sangat penting sebagai bagian dari respons terpadu – pendidikan dasar, peluang belajar kedua, perlindungan sosial, komunikasi yang strategis, mobilisasi sosial dan advokasi – serta peraturan yang lebih baik terkait perburuhan anak dibutuhkan sebagai dasar dalam melakukan respons kebijakan terpadu.
36. Akses dan mutu sekolah yang lebih baik menjadi penting dalam mempengaruhi hasil belajar bila dibandingkan bekerja, sehingga membuat sekolah sebagai alternatif yang lebih menarik dibandingkan bekerja. Peluang belajar “kedua” dibutuhkan untuk menjangkau sebagian besar anak-anak putus sekolah yang tidak berpendidikan atau hanya memiliki latar belakang pendidikan terbatas. Perlindungan sosial yang memadai membantu keluarga-keluarga agar tidak tergantung pada pekerjaan anak-anak mereka. Komunikasi yang strategis diperlukan karena jika keluarga tidak memahami manfaat sekolah (atau kerugian akibat perburuhan anak), atau jika norma-norma sosial budaya yang ada mendukung perburuhan anak, maka kemungkinan besar mereka tidak akan memilih sekolah dibandingkan pekerjaan bagi anak-anak mereka. Advokasi dan mobilisasi sosial diperlukan untuk membangun konsensus yang lebih luas guna menyikapi masalah pekerja anak. Pada akhirnya, memperkuat UU tentang pekerja anak menjadi penting sebagai dasar dan panduan untuk mengambil tindakan.

Meningkatkan akses dan mutu sekolah

37. Ada konsensus luas di mana satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghentikan arus anak-anak usia sekolah terjun ke dunia kerja adalah dengan memperluas dan meningkatkan pendidikan, agar keluarga berpeluang untuk melakukan investasi di bidang pendidikan anak-anak mereka dan hal ini penting dilakukan. Kehadiran di sekolah perlu dibuat sebagai prospek yang menarik bagi anak-anak dan orangtua dengan mengatasi masalah biaya dan absensi di sekolah dan memastikan bahwa sekolah bersifat inklusif dan relevan. Menyediakan pendidikan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah perburuhan anak menjadi penting, tidak saja bagi anak-anak yang bersangkutan tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, mengingat anak-anak yang tumbuh dengan bekal pendidikan dapat memberikan kontribusi yang penting bagi pertumbuhan negara saat mereka beranjak dewasa nanti.

11 Untuk diskusi lengkap tentang bukti yang terkait dengan respons kebijakan terhadap perburuhan anak, lihat: UCW Programme, Child labour: trends, challenges and policy responses – Joining Forces Against Child Labour. Inter-agency report for The Hague Global Child Labour Conference of 2010, Mei 2010.

38. Hasil-hasil empiris yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa pekerja anak di Indonesia kemungkinan besar tidak bersekolah, dan, jika mereka bersekolah, kemungkinan besar mereka akan tertinggal bila dibandingkan teman-teman mereka yang tidak bekerja dan akan putus sekolah secara dini. Hasil-hasil ini menunjukkan perlunya mengatasi masalah akses dan mutu sekolah yang mempengaruhi keputusan orangtua untuk mendaftarkan dan mempertahankan anak-anak mereka di sekolah. Tindakan perlu diambil sesuai upaya reformasi Pemerintah saat ini dalam kerangka kerja Renstra 2010-2014 dan rencana-rencana reformasi lainnya.

- ♦ *Pengembangan dan pendidikan anak-anak usia dini (Early childhood development and education/ ECDE).* Bukti yang diperoleh dari beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa program-program ECDE dapat berjalan sangat efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi terkait pemanfaatan waktu anak-anak. Program-program ECDE dapat mempromosikan kesiapan anak-anak untuk belajar, meningkatkan pendaftaran sekolah dan kelangsungan sekolah, serta membantu anak-anak agar tidak bekerja di tahap dini. Negara ini sudah memiliki beberapa program ECDE formal dan non-formal, namun masih perlu memperluas program ini agar dapat memenuhi target 75 persen cakupan layanan ECDE pada tahun 2015.
- ♦ *Mengurangi ketidaksetaraan akses.* Walaupun kesenjangan masuk SD antar kelompok penghasilan semakin menyempit, namun ketidaksetaraan masih dapat dijumpai di tingkat SMP dan SMA. Penelitian yang dilakukan Bank Dunia (2006a) misalnya, menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin kemungkinan besar hanya 20 persen yang masuk SMP dibandingkan mereka yang tidak miskin. Di samping itu, perbedaan besar secara regional terlihat dalam hal akses ke pendidikan yang berada di belakang peningkatan pendaftaran sekolah di tingkat nasional. Akibatnya, banyak anak-anak dan remaja gagal melanjutkan sekolah ke SMP dan putus sekolah dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai.
- ♦ *Mutu sekolah.* Ada kebutuhan umum untuk meningkatkan mutu sekolah agar sekolah dianggap sebagai alternatif penting oleh orangtua dibandingkan bekerja. Peringkat Indonesia terus merosot dalam tes prestasi murid sesuai standar internasional, bahkan setelah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi. Walaupun masalah pengukuran membuat hubungan antara mutu sekolah dengan pekerja anak sulit ditunjukkan secara empiris untuk Indonesia, namun penelitian di negara lain menunjukkan bahwa pertimbangan mutu dapat merupakan keputusan penting terkait perburuhan anak.¹² Mutu sekolah yang buruk dapat mengakibatkan anak-anak putus sekolah dan terlibat dalam pekerja anak karena anak-anak dan keluarga mereka menganggap nilai pendidikan lebih rendah dari nilai pekerjaan.

Upaya untuk mengatasi masalah mutu muncul dalam perencanaan reformasi namun kini hal tersebut perlu dioperasionalkan dalam sistem pendidikan. Promosi pendidikan bermutu membutuhkan penerapan beberapa metode belajar yang inklusif, ramah anak-anak dan ramah perempuan sehingga mendorong partisipasi anak-anak ketimbang belajar menghafal biasa, dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan belajar anak-anak. Upaya ini juga membutuhkan upaya terus-menerus untuk mengatasi masalah kualifikasi guru, untuk menjawab berbagai bukti empiris yang menunjukkan bahwa pendidikan guru terkait positif dengan pendidikan anak-anak dan terkait negatif dengan perburuhan anak.

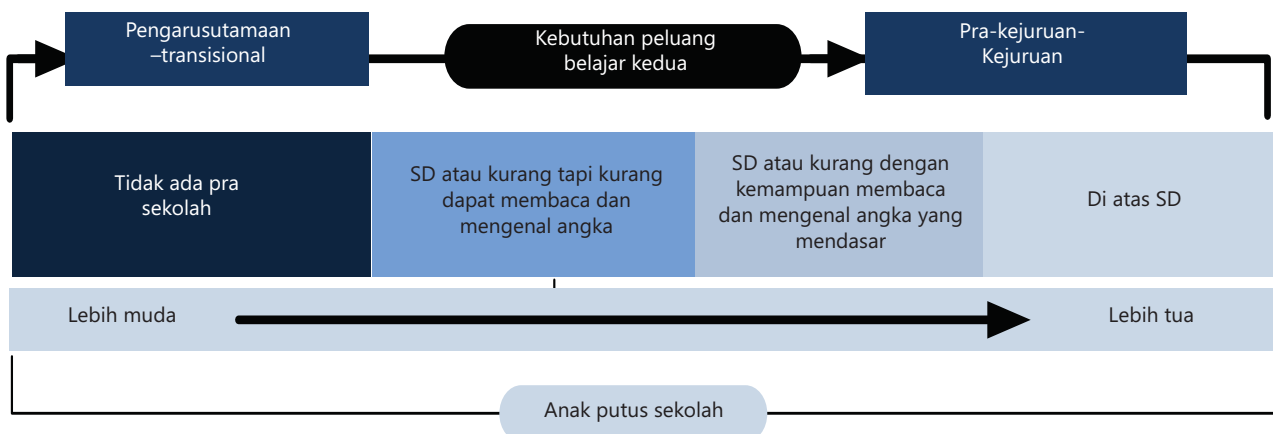
12 Untuk diskusi lebih lengkap tentang persoalan ini, lihat, UCW Project, Does school quality matter for working children? A summary of recent empirical evidence. UCW Working Paper, Roma, April 2007.

Tabel 6. Meningkatkan akses dan mutu sekolah: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Akses yang lebih luas untuk memperoleh kesempatan belajar di usia dini (ECE).	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan sentra ECDE Menetapkan pondasi peraturan dan administratif untuk jaringan ECE nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya peluang pendidikan anak-anak usia dini mempengaruhi kesiapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan formal.
Mengurangi ketidaksetaraan dalam hal akses ke sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Upaya yang ditargetkan untuk mengatasi masalah akses khusus bagi kelompok rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksetaraan regional dalam hal penghasilan dan akses pendidikan masih tetap ada di jenjang pendidikan SMP dan SMA.
Meningkatkan mutu dan relevansi sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan metode belajar yang inklusif, ramah anak-anak dan ramah perempuan. Meningkatkan kualifikasi guru. Memasukkan ke dalam kurikulum persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan anak-anak, termasuk perburuhan anak dan masalah sosial yang lain, sesuai umur mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> Masalah mutu sekolah dapat mempengaruhi keinginan keluarga untuk berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka dan bukan terlibat dalam perburuhan anak.

Memperluas peluang belajar kedua

39. Laporan ini menyorot banyaknya anak-anak putus sekolah di Indonesia, di mana mereka memiliki pendidikan formal yang terbatas atau tidak sama sekali. Anak-anak yang memiliki pendidikan terbatas atau tidak berpendidikan ini berada dalam posisi yang lemah dalam pasar tenaga kerja di saat mereka dewasa nanti, sehingga sangat berisiko menjadi pengangguran dan hidup dalam kemiskinan. Jika dibiarkan, anak-anak dan remaja ini kemungkinan besar butuh kebijakan remediasi lain (yang jauh lebih mahal) pada siklus kehidupan mereka selanjutnya.

Tabel 7. Menilai kebutuhan peluang belajar kedua untuk anak-anak putus sekolah

40. Banyaknya jumlah anak-anak putus sekolah di Indonesia menunjukkan perlunya strategi nasional untuk memberi peluang belajar kedua, mengimbangi konsekuensi perburuhan anak akibat pendidikan yang negatif serta menghindari banyaknya anak-anak yang terjun ke pasar tenaga kerja saat dewasa nanti dengan posisi yang kurang menguntungkan, sehingga menghambat pengalaman kerja dini mereka secara permanen. Strategi ini akan menyatukan dan mengintegrasikan berbagai inisiatif yang ada di bidang ini, termasuk Pendidikan untuk Ketenagakerjaan Muda (*Education for Youth Employment/EYE*).

Tabel 8. Peluang belajar kedua: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Memperluas peluang belajar kedua	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan strategi nasional untuk peluang belajar kedua 	<ul style="list-style-type: none"> Peluang belajar kedua membantu mengimbangi konsekuensi perburuhan anak akibat pendidikan yang negatif

Memperluas perlindungan sosial

- Pentingnya perlindungan sosial dalam mengurangi perburuhan anak sudah diakui. Instrumen perlindungan sosial berfungsi untuk mencegah keluarga rentan terlibat dalam perburuhan anak dan berfungsi sebagai penyangga terhadap guncangan yang bersifat negatif. Tidak ada satu resep tunggal untuk melaksanakan program-program perlindungan sosial guna mengurangi tingkat kerentanan keluarga dan perburuhan anak. Program transfer tunai bersyarat maupun tanpa syarat, termasuk berbagai bentuk dana bantuan untuk anak-anak, tunjangan keluarga, bantuan sosial berbasis kebutuhan dan pensiun sosial, semuanya terkait dengan upaya untuk memastikan mata pencaharian keluarga dan menambah penghasilan masyarakat miskin. Skema pekerjaan umum dapat berfungsi sebagai tujuan utama dalam menyediakan sumber pekerjaan bagi para pencari nafkah keluarga dan tujuan sekunder untuk membantu merehabilitasi prasarana umum dan memperluas layanan mendasar, yang secara potensial terkait dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada perburuhan anak. Skema pinjaman mikro dapat membantu meringankan hambatan anggaran keluarga dan mengurangi risiko sosial.
- Pengalaman dari negara lain – terutama Amerika Latin– menunjukkan bahwa skema transfer tunai bersyarat sesuai kehadiran di sekolah dan keluar dari perburuhan anak menunjukkan rute yang sangat menjanjikan untuk melindungi keluarga dan mempromosikan pendidikan sebagai cara alternatif dari perburuhan anak. Insentif-insentif ini dapat menyediakan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga miskin, serta mengganti hilangnya penghasilan ekonomi dari anak-anak mereka. Karenanya, insentif ini menawarkan sarana untuk menghapus kemiskinan penghasilan saat ini serta mengatasi masalah kurangnya investasi untuk pendidikan anak yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Program transfer tunai bersyarat diluncurkan tahun 2007, dikenal sebagai *Program Keluarga Harapan* (PKH), menawarkan titik awal penting dalam konteks ini. program PKH ini terkait dengan upaya untuk menghapus perburuhan anak yang dilaksanakan sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional – Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (NAP-WFCL).¹³

Tabel 9. Memperluas perlindungan sosial: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Memperluas akses ke perlindungan sosial formal	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dan memperluas kegiatan seperti transfer tunai bersyarat dan menilai potensi kegiatan tersebut sebagai sarana untuk menghapus perburuhan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumen perlindungan sosial berfungsi untuk mencegah keluarga rentan terlibat dalam perburuhan anak dan sebagai penyangga terhadap guncangan yang bersifat negatif.

13 Rencana Aksi Nasional untuk Menghapus Bentuk-bentuk Terburuk dari Pekerjaan Anak.

Komunikasi yang strategis, mobilisasi sosial dan advokasi

43. Komunikasi yang strategis diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk membangun konsensus luas untuk melakukan perubahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kurangnya pemahaman secara umum di Indonesia tentang perbedaan antara pekerjaan untuk anak yang dapat diterima dan perburuhan anak eksploitatif.¹⁴ Konsekuensi dari perburuhan anak dan UU yang melindungi anak-anak kurang dipahami di tingkat masyarakat. Penerimaan atas pekerjaan yang mampu mencegah anak-anak dari sekolah terus diterima, terutama pekerjaan yang melibatkan anak perempuan. Hal ini menunjukkan perlunya memperluas komunikasi yang strategis tentang dampak negatif dari perburuhan anak dan manfaat pendidikan sebagai bagian dari strategi keseluruhan terhadap pekerja anak.
44. Perburuhan anak adalah contoh nyata di mana norma sosial dan pertimbangan ekonomi merupakan hal penting, serta komunikasi yang strategis perlu dirancang berdasarkan pemikiran ini. Keluarga membutuhkan informasi tentang kerugian atau bahaya perburuhan anak serta manfaat pendidikan agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentang alokasi waktu anak-anak mereka. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang pendidikan anak dan perburuhan anak mungkin lebih dari sekedar masalah kondisi ekonomi atau kondisi pekerjaan. Perilaku budaya dan persepsi masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan keluarga tentang pendidikan dan perburuhan anak, dan oleh karena itu perlu juga ditargetkan dalam upaya komunikasi strategis.
45. Upaya komunikasi dibutuhkan di tingkat nasional maupun lokal. Kombinasi saluran komunikasi yang konvensional (misalnya radio, televisi dan media cetak) dan non-konvensional (misalnya tokoh agama, guru sekolah, petugas layanan kesehatan) menjadi penting guna mencapai penyuluhan yang maksimal. Informasi mendasar tentang pengetahuan dan perilaku budaya lokal terhadap masalah perburuhan anak diperlukan agar dapat menyesuaikan pesan komunikasi, serta perubahan evaluasi tentang kesadaran dan perilaku masyarakat setelah kegiatan komunikasi dilakukan. Menyediakan informasi tentang UU nasional terkait pekerja anak, yang disampaikan dalam bentuk-bentuk yang dapat dipahami penduduk dan masyarakat terkait, adalah prioritas komunikasi yang lain. Bagi anak perempuan khususnya, ada juga kebutuhan untuk mendidik keluarga tentang pekerjaan rumah apa yang dapat diserahkan kepada anak-anak dan pekerjaan apa yang tidak boleh diserahkan kepada mereka. Walaupun melakukan pekerjaan ringan di sekitar rumah adalah penting untuk sosialisasi anak-anak, namun penelitian menunjukkan bahwa anak-anak melakukan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama dan hanya punya sedikit waktu untuk istirahat, belajar atau bermain.
46. Upaya untuk mengurangi perburuhan anak secara berkelanjutan membutuhkan adanya konsensus sosial tidak saja di tingkat rumah tangga. Respons kebijakan terhadap masalah perburuhan anak mungkin tidak efektif bila tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat madani dan mitra sosial dalam melaksanakan kebijakan ini, atau dari komitmen politik tingkat tinggi untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan prioritas semua agenda pembangunan nasional. Selain itu, UU untuk melindungi anak-anak dari perburuhan anak kemungkinan besar tidak efektif jika tidak didukung oleh konsensus sosial yang luas. Mobilisasi sosial menjadi penting dengan melibatkan partisipasi berbagai aktor sosial dalam menghapus perburuhan anak. Para aktor sosial ini, mencakup misalnya LSM, organisasi berbasis agama, organisasi guru, media massa, serikat pekerja, asosiasi pekerja, organisasi pengusaha, memainkan peran penting dalam upaya masyarakat yang lebih luas menghapus perburuhan anak.
47. Komitmen politik di semua tingkatan diperlukan untuk memastikan upaya pengurangan perburuhan anak tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan diberikan sumber anggaran yang memadai.

14 Revue des politiques, des programmes et de la législation relatifs à l'emploi des jeunes et la lutte contre le travail des enfants au Indonesia, Maret 2011.

Table 10. Komunikasi yang strategis, mobilisasi sosial dan advokasi: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan, dan kerugian dan risiko yang terkait dengan perburuhan anak.	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye komunikasi di tingkat nasional, dengan menggunakan saluran komunikasi modern dan tradisional. Kampanye komunikasi di tingkat daerah, menggunakan saluran komunikasi modern dan tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan keluarga terkait pendidikan dan perburuhan anak dapat diisyaratkan melalui informasi yang tidak akurat, kurangnya informasi atau norma sosial yang memburuk.
Memobilisasi aktor sosial dalam upaya menghapus perburuhan anak	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi sosial berbasis luas, yang bertujuan untuk melibatkan berbagai aktor sosial (misalnya LSM, organisasi keagamaan, organisasi guru, media massa, serikat pekerja, asosiasi pekerja, organisasi pengusaha) dalam upaya memerangi perburuhan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi sosial adalah penting untuk melibatkan berbagai aktor sosial dalam upaya memerangi perburuhan anak.
Membangun kemauan politik dalam melakukan aksi menentang pekerja anak	<ul style="list-style-type: none"> Menganjurkan kebijakan legislatif yang efektif dan respons programatis untuk menghapus perburuhan anak, Menganjurkan “pengarusutamaan” masalah perburuhan anak secara efektif ke dalam rencana pembangunan nasional yang lebih luas. 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen politik di semua tingkatan diperlukan untuk memastikan bahwa pengurangan perburuhan anak tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan diberi sumber anggaran yang memadai.

Memperkuat UU tentang perburuhan anak sebagai dasar untuk mengambil tindakan

48. UU ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar internasional tentang perburuhan anak dibutuhkan baik sebagai pernyataan tentang keinginan nasional dan sebagai kerangka hukum dan peraturan untuk mengambil tindakan terhadap perburuhan anak. Informasi tentang keterlibatan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang diidentifikasi secara nasional perlu dikumpulkan sebagai komponen survei rumah tangga nasional tentang perburuhan anak serta melalui pemantauan lokal. Pemerintah daerah perlu didorong untuk menerapkan ordinans guna melindungi anak-anak dari pekerjaan eksploitatif dalam konteks lokal.
49. Upaya legislatif perlu diikuti dengan pembuatan mekanisme yang efektif untuk memantau dan menegakkan UU. Kapasitas aktual pemerintah untuk memantau tempat kerja formal adalah terbatas, dan sebagian besar sektor ekonomi informal berada di luar aturan pengawasan formal. Kapasitas inspektorat pengawasan ketenagakerjaan saat ini perlu ditingkatkan agar pengawas ketenagakerjaan dapat memberi masukan kepada para pemangku kepentingan tentang bahaya perburuhan anak, membimbing pelaksanaan kebijakan sosial dan tenaga kerja, serta memberlakukan UU ketenagakerjaan dan standar keselamatan tempat kerja.
50. Namun dikarenakan luasnya masalah perburuhan anak dan hambatan sumber daya, maka sistem pengawasan formal itu sendiri akan sulit melindungi anak-anak secara efektif dari pelanggaran di tempat kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sistem pemantauan masyarakat, di mana pengawas ketenagakerjaan dapat bergabung dengan organisasi-organisasi lain (misalnya organisasi pengusaha, pekerja sosial, organisasi masyarakat setempat) untuk membentuk sistem pemantauan perburuhan anak secara luas di tingkat daerah.

Merrespons masalah pekerja muda

51. Tantangan serius yang dihadapi kaum muda Indonesia yang memasuki pasar tenaga kerja menunjukkan pentingnya kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang ditargetkan pada kaum muda. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif bertujuan untuk meningkatkan hasil pasar tenaga kerja dalam hambatan institusional dan ekonomi makro yang ada; namun reformasi ekonomi struktural lebih luas yang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran di kalangan muda secara jangka panjang berada di luar cakupan laporan ini. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang mengatasi hambatan dari sisi penawaran dan permintaan terhadap pekerjaan adalah relevan untuk meningkatkan hasil pasar tenaga kerja bagi para remaja.
52. Kebijakan dari sisi penawaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus kaum muda yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Untuk mereka yang lebih berpendidikan, ada kebutuhan untuk memastikan keterampilan yang tepat diperoleh, dan keterampilan yang tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dikurangi, serta terdapat mekanisme pasar tenaga kerja untuk memfasilitasi kesesuaian antara pencari kerja dengan pengusaha. Sedangkan bagi mereka yang kurang berpendidikan, peluang pendidikan kedua dalam berbagai dimensinya dibutuhkan, agar dapat membekali mereka dengan keterampilan hidup dan kemampuan kerja yang dibutuhkan agar dapat keluar dari pekerjaan bermutu rendah dan berproduktivitas rendah di sektor informal. Kebijakan dari sisi permintaan mencakup upaya untuk mempromosikan kewirausahaan muda sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi masalah rendahnya permintaan akan tenaga kerja dan keterbatasan peluang usaha bagi pekerja muda. Hasil kerja perempuan muda terbilang sangat buruk dan oleh karena itu mereka membutuhkan adanya kebijakan khusus yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan yang adil di pasar tenaga kerja.
53. Prioritas kebijakan ini bukan merupakan hal baru dan tercermin dalam sebagian besar Rencana Aksi Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia (Indonesia Youth Employment Action Plan/IYEAP) serta dokumen-dokumen kebijakan yang lain. Karenanya, tantangan utamanya bukanlah penyusunan kerangka kerja kebijakan bagi pekerja muda tersebut, namun pelaksanaan kerangka kerja tersebut yang secara efektif mengintegrasikan, mengkoordinir dan memperluas upaya program yang ada. Prioritas kebijakan pasar tenaga kerja aktif dibahas secara lebih terperinci di bawah ini, terutama berdasarkan materi IYEAP.

Pengembangan keterampilan

54. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja kaum muda membutuhkan tindakan di tiga tahapan: pertama, adanya kebutuhan untuk memperkuat mutu pendidikan dasar dan relevansinya dengan kebutuhan kaum muda yang akan memasuki pasar tenaga kerja; kedua, menyediakan peluang belajar kedua bagi kaum muda yang tidak memperoleh pendidikan memadai, termasuk mereka yang dipaksa putus sekolah di usia dini untuk bekerja; dan ketiga, memperluas efektivitas dan jangkauan program pendidikan teknis dan pelatihan kejuruan. Bersama-sama, tindakan ini akan membantu membekali kaum muda dengan keterampilan dan pengalaman kerja yang memadai agar berhasil memperoleh pekerjaan yang lebih baik sebagai pekerja atau wiraswasta. Meningkatkan pendidikan dasar dan peluang belajar kedua diuraikan dalam bagian 14.2 laporan ini, karena termasuk dalam upaya yang lebih luas untuk mempromosikan pendidikan sebagai cara alternatif. Pendidikan kejuruan dan pelatihan juga termasuk di dalamnya.
55. Banyak hal yang sudah terjadi di bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia. Meskipun demikian, tampaknya kurang adanya koordinasi nasional dalam hal menyusun kebijakan tentang pelatihan kerja; keterbatasan koordinasi antara pemasok publik dan swasta; keterbatasan partisipasi industri dalam kebijakan dan perencanaan; tidak ada standar nasional dan pengakuan; dan fokus terhadap pekerjaan di sektor formal terlalu besar; dan diabaikannya ekonomi informal. Di samping itu, tidak ada penelitian penelusuran (tracer study) sistematis yang telah dilakukan, hanya ada sedikit

informasi tentang apa yang telah terjadi pada para lulusan berbagai program, bagaimana mereka diserap oleh pasar tenaga kerja, dan seberapa besar pendidikan mereka relevan dengan kebutuhan usaha.

56. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan di beberapa daerah sesuai kerangka kerja proses reformasi pendidikan kejuruan dan sistem pelatihan yang ada. Prioritas mencakup pengembangan standar pengakuan atas keterampilan berbasis kompetensi yang dirancang agar pasar tenaga kerja menjadi lebih transparan dan keterampilan menjadi lebih mudah diterapkan. Membangun kapasitas jaringan balai pendidikan dan pelatihan kejuruan menjadi prioritas penting lainnya, agar balai-balai pelatihan ini dapat *berfungsi sebagai lembaga model* yang dapat ditiru oleh sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang lain. Balai-balai pelatihan ini membutuhkan bantuan secara terus-menerus dalam merumuskan kebijakan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait (yaitu pemerintah daerah, kamar dagang dan industri serta organisasi pengusaha, dan penyedia pelatihan sektor swasta).
57. Paparan terhadap dunia kerja merupakan bagian penting dari persiapan kaum muda memasuki pasar tenaga kerja, tidak saja untuk membentuk karir pendidikan mereka di usia dini tapi juga untuk memfasilitasi peralihan dari sistem pendidikan ke lingkungan kerja di mana keterampilan dan sikap baru dibutuhkan. Pengusaha perlu didorong dalam konteks ini untuk menyediakan pengalaman kerja, termasuk program-program magang, yang dapat membantu pelajar melihat hubungan antara dunia sekolah dengan dunia kerja, guna memahami bagaimana pengetahuan dan keterampilan tertentu diterapkan dalam konteks dunia nyata serta mengembangkan sikap baru dan memperoleh keyakinan diri. Pengusaha juga dapat membantu para guru dengan memberi saran mengenai standar teknologi dan industri, serta memperbaiki kurikulum. Organisasi pengusaha memainkan peran penting sebagai penengah antara pendidikan dengan pelatihan.

Tabel 11. Pengembangan keterampilan: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Mengatasi hambatan keterampilan yang terkait dengan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan standar pengakuan atas keterampilan berbasis kompetensi di seluruh negeri • Mengembangkan kapasitas jaringan balai pendidikan dan pelatihan kejuruan sebagai lembaga model • Mengembangkan program magang dan pengalaman kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Defisiensi dalam hal permodalan manusia terlatih, terutama profesi teknis, merupakan hambatan utama bagi keberhasilan peralihan ke pekerjaan layak untuk para remaja.

Bantuan pencarian kerja

58. Peralihan yang sulit ke pasar tenaga kerja di Indonesia sebagian diakibatkan kurangnya informasi tentang pasar tenaga kerja dan keterampilan mencari pekerjaan. Saat ini, terdapat beberapa mekanisme formal di negeri ini yang mengaitkan pencari kerja muda dengan pasar tenaga kerja dan pengusaha melalui lowongan kerja. Sebagian besar pencari kerja muda bergantung pada jaringan informal dan kontak untuk mencari pekerjaan sementara peran layanan pekerjaan publik, balai pendidikan dan pelatihan serta pameran kerja memainkan peran yang sangat kecil. Terdapat kebutuhan akan kemitraan publik-swasta yang erat dalam mengembangkan beberapa program layanan kerja yang menyediakan informasi tentang pencarian kerja bagi kaum muda.
59. Adalah penting untuk memastikan bahwa kaum muda yang berisiko dapat mengakses program-program layanan kerja ini. Hal ini mungkin sulit dilakukan karena sebagian besar kaum muda yang berisiko tinggal di daerah perkotaan atau desa yang marjinal, sementara sebagian besar layanan kerja ditawarkan di lokasi-lokasi yang lebih terpusat. Salah satu kritik terhadap program layanan kerja ini di negara lain adalah bahwa mereka yang memperoleh manfaat dari program-program ini biasanya mereka yang lebih memenuhi syarat dan memiliki koneksi sehingga lebih mungkin dipekerjakan. Hal ini menunjukkan

pentingnya upaya untuk menargetkan bantuan pencarian kerja kepada kaum muda rentan yang paling membutuhkannya.

60. Persiapan yang lebih baik bagi para lulusan sekolah untuk masuk ke pasar tenaga kerja juga menjadi penting agar dapat memfasilitasi proses penyesuaian kerja dan mengurangi masa menganggur, sehingga mempermudah peralihan dari sekolah ke dunia kerja. Informasi tentang pasar tenaga kerja dan panduan karir yang sensitif gender perlu ditawarkan dalam konteks ini kepada kaum muda yang masih bersekolah melalui sistem pendidikan dan pelatihan dan kepada pencari kerja muda melalui media. Hal ini membutuhkan upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi serta lembaga-lembaga terkait lainnya, untuk memperkuat layanan bimbingan karir di sekolah, yang tersedia di sebagian besar lembaga pendidikan menengah dan yang lebih tinggi.

Tabel 12. Bantuan pencarian kerja: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Menyediakan bantuan pencarian kerja untuk mengatasi kekurangan keterampilan dan sumberdaya pencarian kerja	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk dinas pekerjaan, panduan dan nasehat karir yang ditargetkan untuk para remaja Memperkuat layanan bimbingan karir di sekolah menengah dan lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Peralihan sulit ke pasar tenaga kerja di Indonesia sebagian dikarenakan oleh kurangnya informasi tentang pasar tenaga kerja dan keterampilan mencari pekerjaan.

Mempromosikan kewirausahaan muda

61. Mempromosikan kewirausahaan muda merupakan strategi penting dari sisi permintaan untuk memperluas kesempatan kerja bagi kaum muda dan meningkatkan hasil kerja kaum muda Indonesia yang saat ini menganggur atau setengah menganggur. Usaha kecil menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, meskipun peran pengusaha muda dalam mengembangkan UKM sejauh ini masih terbatas. Kaum muda yang bekerja sendiri terkonsentrasi pada kegiatan berproduktivitas rendah dan kegiatan untuk bertahan hidup dalam perekonomian informal.
62. Beberapa tindakan kebijakan relevan dengan upaya untuk memperluas kesempatan wirausaha bagi kaum muda di Indonesia. Memperluas akses ke sumber kredit mungkin menjadi paling penting dalam konteks ini. Penghambat utama bagi pengusaha muda adalah kurangnya akses ke sumber kredit dan pendanaan, karena mereka tidak memiliki jaminan yang dibutuhkan pihak bank untuk memperoleh pinjaman dan dianggap sebagai kelompok berisiko tinggi. Mereka akhirnya harus meminjam uang melalui jaringan informal, yaitu keluarga dan teman. Sistem pinjaman ini membatasi kegiatan mereka serta tingkat pertumbuhan pengusaha muda. Hal ini menunjukkan perlunya upaya mengembangkan instrumen pinjaman khusus agar dapat memfasilitasi akses keuangan bagi para pengusaha muda. Instrumen-instrumen ini dapat mencakup dana bantuan, pinjaman lunak, dan kegiatan bantuan dalam meningkatkan mutu permintaan pinjaman. Memperluas fasilitas kredit mikro juga relevan dalam hal ini, terutama karena adanya bukti yang menunjukkan bahwa permintaan akan keuangan mikro hanya dipenuhi sebagian oleh penyedia kelembagaan yang ada.¹⁵
63. Mempromosikan budaya wirausaha di kalangan muda juga penting. Kewirausahaan sering dianggap sebagai upaya terakhir (dan hanya karena kebutuhan). Menurut hasil temuan survei, lulusan sekolah lebih suka bekerja di sektor publik, diikuti perusahaan multi-nasional dan perusahaan domestik skala besar, dan hanya sedikit yang tertarik untuk memulai usaha sendiri atau mencari pekerjaan di perusahaan domestik swasta skala kecil. Preferensi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

¹⁵ Bukti tentang adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran keuangan mikro berasal dari evaluasi terbaru layanan perbankan mikro (Kupedes) BRI (BRI, 2003).

harapan kaum muda dengan kenyataan di pasar kerja akibat sebagian besar kesempatan ada di UKM dan perekonomian informal. Ada kebutuhan untuk memperluas dan “mengarusutamakan” inisiatif yang ada untuk mempromosikan budaya baru kewirausahaan melalui sistem pendidikan dan pelatihan serta kampanye peningkatan kesadaran masyarakat.

64. Memperluas akses ke layanan bantuan dan konsultasi bisnis yang efektif, dan kapasitas untuk melaksanakannya, adalah elemen penting yang lain dalam mempromosikan kewirausahaan muda. Isolasi dan kurangnya bantuan adalah masalah yang dialami banyak pengusaha muda perempuan dan laki-laki; hal ini sering mencegah mereka memperoleh dasar yang kuat di dunia usaha. Layanan bantuan yang relevan untuk pengusaha muda termasuk ruang usaha atau layanan inkubator bisnis; pelatihan dan bimbingan usaha, menyediakan saran dan bimbingan kepada pengusaha muda dari tenaga profesional berpengalaman; pelatihan kerja dan lokakarya yang difokuskan pada persoalan membuka usaha; dan kamar dagang dan industri muda, asosiasi perdagangan, jaringan pengusaha. Sekali lagi, ada beberapa inisiatif yang sedang dilaksanakan lembaga pemerintah, universitas dan sektor swasta, walaupun inisiatif ini masih tetap terisolasi. Apa yang hilang adalah sarana untuk melakukan koordinasi dan berbagi pelajaran terkait pekerjaan dalam kondisi yang berbeda.
65. Pembentukan kelompok-kelompok mandiri dan organisasi berbasis anggota, termasuk koperasi, oleh kaum muda juga memungkinkan akses yang lebih baik ke informasi tentang pasokan, kredit dan pasar. Terutama dalam pekerjaan subkontrak atau berbasis di rumah, organisasi kelompok pekerja muda, terutama perempuan muda, dapat meningkatkan posisi tawar mereka dibandingkan kontraktor atau pembeli, sehingga mereka dapat menghasilkan produksi yang lebih efisien dan efektif biaya, serta memfasilitasi tabungan kelompok dan pengaturan kredit. Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah, masyarakat setempat serta inisiatif swasta publik dapat memainkan peran penting. Semua pemangku kepentingan terkait didorong untuk berbagi pengalaman mereka melalui Jaringan Pekerja Muda Indonesia untuk menghasilkan pembelajaran dan inovasi.

Tabel 13. Mempromosikan kewirausahaan remaja dan self employment: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Mempromosikan kewirausahaan remaja dan wirausaha untuk mengatasi permintaan akan tenaga kerja dan hambatan dalam membuka usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan layanan bantuan bagi pengusaha muda, termasuk layanan inkubator bisnis, pelatihan tentang cara membuka usaha dan mengembangkan rencana bisnis • Menyediakan pinjaman kredit mikro dan/atau sarana dan perelatan untuk membuka usaha. • Membentuk kelompok mandiri dan organisasi berbasis anggota, termasuk koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program-program wirausaha memiliki potensi untuk meningkatkan hasil pekerjaan bagi sebagian besar remaja Indonesia yang saat ini menganggur, setengah menganggur atau yang melakukan pekerjaan pertanian berproduktivitas rendah.

Memastikan kesempatan yang adil untuk perempuan muda di pasar tenaga kerja

66. Kaum perempuan muda terus menghadapi masalah kecilnya peluang di pasar tenaga kerja. Partisipasi perempuan muda di pasar tenaga kerja 17 persen di belakang laki-laki, sementara jumlah perempuan muda yang tidak aktif dan tidak bersekolah hampir tiga kali lipat jumlah laki-laki muda. Ini menunjukkan potensi produktif perempuan muda yang kurang dimanfaatkan. Perempuan muda juga menghadapi masalah kesempatan kerja yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki dan cenderung terpaku di sektor perekonomian informal. Sebagai contoh, perempuan muda memiliki perwakilan tertinggi di bidang pertanian dan kegiatan perdagangan, yang cenderung kurang formal dan berupah lebih rendah dari sektor-sektor industri yang lain.

67. Yang mendasari situasi ini adalah persepsi tentang peran gender, dan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan, yang tetap tertanam dalam berbagai segmen masyarakat dan terus mempengaruhi posisi dan kesempatan perempuan untuk bekerja. Kesempatan bagi perempuan muda untuk merencanakan karir sangat terbatas di mana mereka diharapkan berhenti kerja setelah menikah atau setelah melahirkan anak pertama. Dalam berbagai kasus, sikap dan persepsi tradisional menghambat kesempatan perempuan untuk memperoleh penghasilan sendiri. Oleh karena itu, perempuan muda sudah menghadapi kerugian serius sejak awal transisi mereka ke dunia kerja.
68. Posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan muda di pasar tenaga kerja ini menunjukkan perlunya upaya terus-menerus untuk memastikan kesempatan dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki muda di bidang pendidikan, pekerjaan dan kemasyarakatan. Untuk memastikan kaum perempuan muda memperoleh manfaat dari kesempatan yang adil untuk memasuki pasar tenaga kerja dan memperoleh keberhasilan, kebijakan tertentu termasuk memastikan sensitivitas gender selama pendidikan/sistem pelatihan dan dalam bimbingan karir; kampanye komunikasi yang bertujuan untuk mengubah persepsi tradisional tentang peran gender; dan mengkaji UU dan praktik untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di pasar tenaga kerja. Upaya ini perlu dibangun berdasarkan peraturan dan kebijakan substansial yang sudah diperkenalkan di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses yang adil ke pekerjaan, kesetaraan upah, dan ketentuan tentang tanggung jawab perempuan dalam mengasuh anak.

Tabel 14. Memastikan kesempatan yang adil untuk remaja perempuan di pasar tenaga kerja: ringkasan tentang kemungkinan intervensi kebijakan

Tujuan/target kebijakan	Tindakan kebijakan yang mungkin	Latar belakang/relevansi
Memastikan kesempatan yang adil untuk remaja perempuan di pasar tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan sensitivitas gender selama pendidikan/sistem pelatihan dan layanan bimbingan karir. Penyediaan pinjaman kredit mikro dan/atau sarana dan peralatan untuk membuka usaha. Kampanye komunikasi yang bertujuan untuk mengubah persepsi tradisional tentang peran gender Mengkaji UU dan praktik untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di pasar tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Persepsi tentang peran gender, dan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan tetap tertanam dalam berbagai segmen masyarakat dan terus mempengaruhi posisi dan kesempatan perempuan di dunia pekerjaan.